

LAPORAN KINERJA
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
(DIREKTORAT BELMAWA)



DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Satuan Kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Direktorat Belmawa) Tahun 2020. Penyusunan LAKIN ini dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2020 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan, kinerja dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi Kemdikbud. Laporan ini juga digunakan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja tahun Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020.

Laporan Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2020 menyajikan capaian kinerja program pembelajaran, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu. Sejalan dengan implementasi reformasi birokrasi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah meningkatkan akuntabilitas kinerja, di antaranya melalui penajaman indikator kinerja dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap tahun dalam kerangka Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga senantiasa melaksanakan secara konsisten sistem pengendalian kegiatan melalui fungsi pemantauan dan evaluasi.

Laporan Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2020 disusun dengan mengacu pada indikator kinerja dan berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Harapannya, berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini, disampaikan ucapan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan sehingga LAKIN Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020 dapat diselesaikan. Semoga LAKIN ini bermanfaat bagi pengembangan program-program pembelajaran, kemahasiswaan, dan penjaminan mutu di masa yang akan datang.

Direktur Belmawa,

Aris Junaidi

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu tata kelola yang berorientasi pada hasil (kinerja) dan meningkatkan kualitas layanan publik. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka mengimplementasikan SAKIP secara baik adalah melakukan perbaikan pada komponen sakip yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja, serta menindaklanjuti catatan-catatan penting rekomendasi hasil evaluasi.

Sesuai amanah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pendidikan tinggi akademik;
- c. perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik,
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik,
- c. pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik,

- d. fasilitasi di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik,
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik,
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Masing-masing sasaran yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya. Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 bisa dilihat dari ketercapaian masing-masing indikator kinerja utama.

Sasaran strategis dan indikator kinerja utama yaitu:

1. Sasaran Program: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi
2. Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dosen dan tenaga kependidikan
3. Sasaran Program: Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Tinggi yang berkualitas

Untuk Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Sasaran Programnya adalah Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Relevansi Pendidikan Tinggi tercantum di dalam Tabel 1.1 berikut

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

No.	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	%	Keterangan Ketercapaian/Ketidaktercapaian Target
SP.5.1	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi					
IKP 5.1.5	Persentase lulusan	%	64.77	75.4	116.4	Jumlah lulusan PT yang langsung bekerja kurang

	perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan					dari 1 tahun setelah lulus sebanyak 90.594 mhs dibagi dengan total sebanyak 120.153 mhs dari 545 PT (Tahun 2018) dan 404 PT (tahun 2019) yang melaporkan.
IKP 5.1.6	Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	30	28.1	93.6	Jumlah lulusan PT dengan gaji minimum 1,5 UMR sebanyak 33.761 mhs dibagi dengan total sebanyak 120.153 mhs dari 545 PT (Tahun 2018) dan 404 PT (tahun 2019) yang melaporkan.
IKP 5.1.7	Persentase lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	%	30	26.22	87.4	Jumlah mahasiswa sebesar 31.510 dengan rincian: (a) Program PERMATA – SAKTI sejumlah 5.659 mhs, (b) Transfer Kredit Internasional (ICT) sejumlah 288 mhs, (c) Kampus Merdeka Perintis (KMP) sejumlah 2.277 mhs, (d) Mahasiswa mengikuti RPL sejumlah 9.517 mhs dan (e) PKM sejumlah 13.769 mhs dengan pembagiannya mahasiswa yang terlapor pada sistem tracer study (pkts.kemdikbud.go.id) mulai tahun 2018 – 2019 sebanyak 120.153 mahasiswa.

Pagu Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam DIPA 2020 yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja kementerian tahun 2020 sebesar Rp 201.318398.000,- yang dianggarkan untuk mencapai target yang ditetapkan berhasil terserap sebesar Rp 184.257.091.973,- sehingga persentase daya serap

anggaran Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sampai Desember 2020 adalah sebesar 91,53% . Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaiannya adalah dikarenakan DIPA sewaktu awal penggabungan ke Kemendikbud digabung menjadi satu DIPA Ditjen Dikti dengan posisi banyak di blokir dan yang baru dibuka adalah output beasiswa dan operasional kantor. DIPA untuk Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan terbit tanggal 14 April 2020 sehingga baru dapat digunakan setelah memasukan spesimen dan lain-lain ke KPPN di bulan Mei 2020. Selanjutnya terjadi pandemi covid 19 yang mengharuskan semua program dan pembelajaran dilakukan secara daring. Efektif capaian dilakukan mulai bulan Juni 2020. Langkah antisipatif yang dilakukan dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dan mempercepat pencairan anggaran dan pelaksanaan program yang masif dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TIK) dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi persiapan dan pelaksanaan program.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Organisasi	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
D. Isu Strategis Permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	6
A. Perencanaan Kinerja.....	6
B. Perjanjian Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
A. Capaian Kinerja.....	8
B. Realisasi Anggaran.....	76
BAB IV PENUTUP	79

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Indikator Kinerja Program Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	iii
Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Belmawa Tahun 2020.....	6
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020	7
Tabel 2.3 Tabel Kegiatan dan Anggaran Direktorat Belmawa TA 2020	7
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020	8
Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Closing Account ADB Loan 2928-INO dan Grant 0343-INO(EF)	10
Tabel 3.3 Serapan Anggaran SFD Loan sampai dengan 2020.....	13
Tabel 3.4 Profil Proyek 7in1	13
Tabel 3.5 Capaian Proyek SFD untuk Universitas Syiah Kuala.....	14
Tabel 3.6 Serapan Anggaran IsDB loan sampai dengan 2020.....	14
Tabel 3.7 Capaian Proyek IsDB untuk 6 Universitas	15
Tabel 3.8 Pekerjaan Tambah di PIU Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Gorontalo	17
Tabel 3.9 Pekerjaan Pengadaan PMU Expert	17
Tabel 3.10 Indikator Kinerja Program Studi Melakukan Kerja Sama Kurikulum dengan Dunia Industri/Dunia Usaha/PT QS Rank 100.....	19
Tabel 3.11 Indikator Kinerja Program Studi Menjadi Model Center of Excelent Kampus Merdeka	24
Tabel 3.12 Prodi penerima program bantuan prodi menjadi model CoE MBKM tahun 2020....	24
Tabel 3.13 Indikator Kinerja Program Studi Melaksanakan Inovasi Pembelajaran Digital	28
Tabel 3.14 Indikator Kinerja Program Studi Menyelenggarakan Uji Kompetensi	31
Tabel 3.15 Jumlah Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi.....	33
Tabel 3.16 Jumlah Peserta Kompeten untuk Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter	33
Tabel 3.17 Jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Peserta Kompeten untuk Uji Kompetensi Mahasiswa.....	33
Tabel 3.18 Jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Peserta Kompeten untuk Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (UKNakes).....	34
Tabel 3.19 Kinerja Mahasiswa Mengikuti Transfer Kredit Internasional	40
Tabel 3.20 Jadwal Pelaksanaan Program Transfer Kredit Internasional	43
Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Mahasiswa Menjalankan Wirausaha	46
Tabel 3.22 Capaian IKK Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha	53
Tabel 3.23 Indikator Kinerja Instrumen Kompetensi Lulusan	57
Tabel 3.24 Jumlah bidang ilmu pada Kegiatan Instrumen Kompetensi Lulusan	58

Tabel 3.25 Jumlah Soal yang dihasilkan (<i>item development</i>) dan Jumlah soal yang di review (<i>item review</i>) pada Program Studi Program Profesi Dokter	59
Tabel 3.26 Jumlah Soal yang dihasilkan (<i>item development</i>) dan Jumlah soal yang di review (<i>item review</i>) pada Program Studi Program Profesi Dokter Gigi	59
Tabel 3.27 Jumlah Soal yang dihasilkan (<i>item development</i>) dan Jumlah soal yang di review (<i>item review</i>) pada Bidang Kesehatan.....	59
Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Pogram <i>Tracer Study</i>	64
Tabel 3.29 Kegiatan <i>Tracer Study</i> pada tahun 2020	65
Tabel 3.30 Persentase Lulusan yang Bekerja dalam Jangka Satu Tahun Setelah Kelulusan	65
Tabel 3.31 Persentase Lulusan dengan Gaji 1,5x UMR	65
Tabel 3.32 Daftar Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan IT Kantor.....	69
Tabel 3.33 Rincian Revisi DIPA Satker Direktorat Belmawa TA 2020	70
Tabel 3.34 Capaian Output Layanan Perkantoran	73
Tabel 3.35 Capaian Bidikmisi 2020.....	74
Tabel 3.36 Target dan Realisasi Penerima Bantuan Bidikmisi.....	74
Tabel 3.37 Capaian ADik 2020	75
Tabel 3.38 Populasi Mahasiswa ADik Tahun 2020.....	75
Tabel 3.39 Capaian Beasiswa Berprestasi 2020	76
Tabel 3.40 Realisasi Per Jenis Belanja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020	77
Tabel 3.41 Rincian Realisasi Belanja Barang Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020	77
Tabel 3.42 Realisasi Per Output Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	3
Gambar 2. Kick off Meeting Penyusunan PCR ADB dengan Dirjen Dikti	12
Gambar 3. Workshop Rekonsiliasi Laporan Keuangan PEDP TA 2019 dengan PIU Politeknik	12
Gambar 4. Gambar Lokasi Sebaran Tujuh Universitas dalam Proyek 7in1	13
Gambar 5. Gedung Universitas Syiah Kuala	14
Gambar 6. Gedung Student Activity Centre di Unesa.....	16
Gambar 7. Gedung Fakultas Hukum di Unsrat.....	16
Gambar 8. Gedung Perpustakaan di UNG.....	16
Gambar 9. Gedung Perpustakaan di Untan.....	16
Gambar 10. Gedung Health and Sport Center di UNY	16
Gambar 11. Gedung Student Center di ULM.....	16
Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara Daring ...	21
Gambar 13. Kegiatan Bimtek Pengembangan KPT untuk Mendukung MBKM secara Blended di Universitas Negeri Semarang	22
Gambar 14. Kegiatan Bimtek Pengembangan KPT untuk Mendukung MBKM secara <i>Blended</i> di Universitas Muhammadiyah Purwokerto	22
Gambar 15. Kegiatan Bimtek bagi Para Penerima Program Bantuan CoE MBKM secara Daring	27
Gambar 16. Diagram Perbandingan antara jumlah peserta yang ikut uji kompetensi dengan jumlah peserta yang kompeten per periode Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)	34
Gambar 17. Diagram Perbandingan antara jumlah peserta yang ikut uji kompetensi dengan jumlah peserta yang kompeten per periode Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMP2DG).....	35
Gambar 18. Diagram Perbandingan antara jumlah peserta yang ikut uji kompetensi dengan jumlah peserta yang kompeten per periode Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (UKNakes)	35
Gambar 19. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan	36
Gambar 20. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter	36
Gambar 21. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi	36
Gambar 22. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi di Malaysia.....	36
Gambar 23. Rapat Penyusunan Panduan Program Transfer Kredit Internasional.....	41
Gambar 24. Sosialisasi Program Transfer Kredit Internasional secara daring	41
Gambar 25. Seleksi Proposal Pengajuan Bantuan Dana Program Transfer Kredit Internasional Tahun 2020	42

Gambar 26. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Kepada Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Dana Transfer Kredit Internasional Tahun 2020	42
Gambar 27. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Transfer Kredit Internasional Tahun 2020.....	43
Gambar 28. Kerangka Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020	46
Gambar 29. Produk Mahasiswa Program KBMI.....	48
Gambar 30. Startup Mahasiswa Program ASMI	50
Gambar 31. Pembukaan Expo KMI oleh Dirjen Dikti	52
Gambar 32. Produk Hasil Wirausaha Mahasiswa.....	55
Gambar 33. Diagram Jumlah Jumlah Soal yang dihasilkan (<i>item development</i>) dan Jumlah soal yang di review(<i>item review</i>) pada Program Studi Program Profesi Dokter.....	60
Gambar 34. Diagram Jumlah Jumlah Soal yang dihasilkan (<i>item development</i>) dan Jumlah soal yang di review (<i>item review</i>) pada Program Studi Program Profesi Dokter Gigi	60
Gambar 35. Diagram Jumlah Jumlah Soal yang dihasilkan (<i>item development</i>) dan Jumlah soal yang di review (<i>item review</i>) pada Program Studi Bidang Kesehatan.....	61
Gambar 36. Pelatihan Penulisan dan Review Soal MCQ, OSCE, Pelatihan Psikometrik soal MCQ dan OSCE Program Studi Profesi Dokter.....	61
Gambar 37. Pelatihan Penulisan dan Penelaahan Soal Uji Teori dan Praktik Program Studi Profesi Dokter Gigi	61
Gambar 38. Pengembangan Item Development dan Item Review Soal Program Studi Bidang Kesehatan.....	62
Gambar 39. Pengembangan Item Development dan Item Review Soal Program Studi Bidang Kesehatan.....	62
Gambar 40. Webinar Tracer Study dan Pendampingan Teknis Pemasukan Data <i>Tracer Study</i> ...	66
Gambar 41. Uji Publik Pengisian Data Aplikasi PRIMA di Universitas Pendidikan Indonesia ..	66
Gambar 42. Workshop Pengisian Data Aplikasi PRIMA yang dilakukan secara luring.....	67
Gambar 43. Workshop Pengisian Data Aplikasi PRIMA yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom.....	68
Gambar 44. Tampilan Menu Login Aplikasi SiCakep	71
Gambar 45. Nilai IKPA Direktorat Belmawa Tahun 2020.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019, tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BAB II, Bagian Kesatu, Pasal 6 disebutkan bahwa Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas: (a) Sekretariat Jenderal, (b) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, (c) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, (d) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, (e) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (f) Direktorat Jenderal Kebudayaan, (g) Inspektorat Jenderal, (h) Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, (i) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan (j) Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan kebijakan di bidang pendidikan tinggi akademik, (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pendidikan tinggi akademik, (c) perumusan pemberian izin penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat, (d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan tinggi akademik, (e) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 45 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 139, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri atas: (a) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, (b) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (c) Direktorat Kelembagaan, dan (d) Direktorat Sumber Daya. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penjaminan mutu, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik serta urusan ketatausahaan Direktorat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik, (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik, (c) pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik, (d) fasilitasi di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik, (e) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik, (f) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik; dan (g) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5) Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

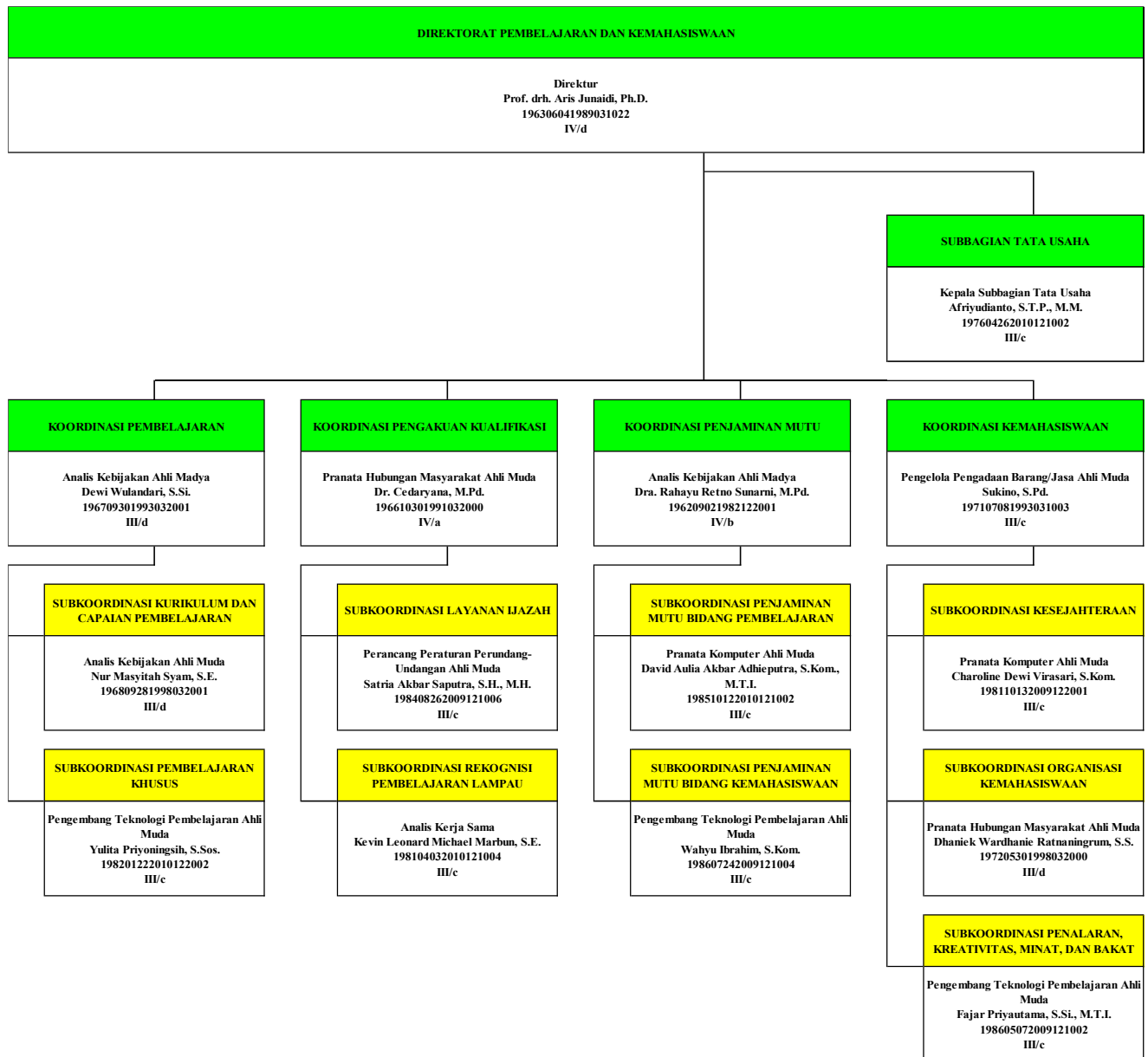
C. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penjaminan mutu, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik serta urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik
- 3) pelaksanaan penjaminan mutu di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik
- 4) fasilitasi di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik
- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi akademik
- 7) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

Struktur Organisasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan sebagaimana disajikan pada Gambar 1. berikut.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan

D. Isu Strategis Permasalahan yang dihadapi oleh Organisasi

Permasalahan Utama Yang Masih Dihadapi

Program dan kegiatan prioritas pendidikan tinggi salah satunya merupakan program dan kegiatan dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan ada yang merupakan lanjutan dari Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti tahun 2015-2019. Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama periode 2020-2024 yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan Sasaran Strategis pendidikan tinggi dalam program pembelajaran dan kemahasiswaan dapat disimpulkan belum tercapai sepenuhnya, misalnya: realisasi APK.

Agar program dan kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan periode 2020-2024 dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi diantaranya:

1. Rendahnya persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan tinggi Indonesia, di mana secara relatif menunjukkan bahwa persentase APK pendidikan tinggi di Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga. Pada Renstra Kemendikbud tahun 2020, APK PT ditargetkan sebesar 33,47%. Target tetapi baru tercapai 30,85%. APK tersebut sebenarnya masih termasuk target pencapaian yang masih rendah. Menurut Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) APK PT untuk negara berkembang minimal harus 36%. Selanjutnya, capaian APK-PT Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain, seperti Malaysia (30%), Filipina (36%), Vietnam (30%), dan Thailand (53%) (http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?name_desc=false, diunduh 20 November 2017). Hal ini menunjukkan bahwa akses dan kesempatan untuk mengikuti pendidikan tinggi harus ditingkatkan.
2. Mayoritas mahasiswa masih berorientasi menjadi job seeker (pencari kerja), bukan job creator (pembuka lapangan kerja/wirausahawan) sebagai profesi utama. Hal ini salah satunya disebabkan kurangnya kreativitas, daya juang, dan kewirausahaan yang diterapkan sebagai bagian dari sistem pembelajaran dan kemahasiswaan di perguruan tinggi. Terlebih lagi masih ditemukan perguruan tinggi yang lebih fokus pada waktu ketepatan kelulusan mahasiswa dan kecepatan memperoleh pekerjaan, dibandingkan kesiapan dalam menciptakan lapangan kerja;
3. Belum optimalnya kompetensi lulusan yang sesuai dengan bidang keahliannya dan kebutuhan industri kerja, yang diakui melalui sertifikasi lembaga profesi terkait. Kebutuhan tenaga terampil yang bersertifikat menjadi lebih penting saat diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), karena dalam era MEA untuk mendapatkan pekerjaan, tenaga terampil yang tidak bersertifikat akan lebih sulit bersaing dengan tenaga terampil bersertifikat. Tentunya, tenaga kerja terampil Indonesia harus bisa bersaing dilapangan kerja, baik di dalam dan di luar negeri dengan memiliki sertifikat profesi yang tidak hanya diakui di Indonesia tetapi juga diakui secara internasional. Sejak tahun 2014 Uji Kompetensi dan sertifikasi tenaga terampil baru dilakukan untuk profesi dokter dan tenaga kesehatan. Tahun 2016 bertambah satu profesi, yakni

uji kompetensi guru. Untuk tenaga profesi lainnya seperti insinyur, akuntan, dan arsitek belum dilakukan hingga sekarang;

4. Kualitas pendidikan tinggi masih belum memadai, dilihat dalam konteks program studi yang menunjukkan masih banyak program studi berakreditasi C dan bahkan belum terakreditasi.
5. Persentase lulusan yang langsung bekerja relatif rendah, mengingat angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi. Hal itu mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing Pendidikan tinggi masih rendah serta masih terjadinya ketidakselarasan antara perguruan tinggi dan dunia kerja. Pengangguran terdidik memberi indikasi bahwa program-program studi yang dikembangkan di perguruan tinggi mengalami kejenuhan karena peningkatan jumlah lulusan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi lulusan perguruan tinggi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar (60%) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk kategori white collar jobs (manajer, profesional) yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru). Namun, Sebagian dari mereka (30%) juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi terampil (tenaga administrasi, sales) bahkan ada juga yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (blue collar jobs). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang dikembangkan di perguruan tinggi masih belum relevan dan belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja menggambarkan perencanaan program dan kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran. Berdasarkan Sasaran Kegiatan “Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan”, ditetapkan sejumlah dua belas Indikator Kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut berfungsi untuk menggambarkan tingkat ketercapaian pelaksanaan program kerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Secara lebih rinci Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	1) Layanan Pelaksanaan PHLN	1
	2) Program Studi Relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha/PT QS Rank 100	765
	3) Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	42.520
	4) Program Studi Melaksanakan Inovasi Pembelajaran Digital	600
	5) Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi	1.400
	6) Mahasiswa Mengikuti Transfer Kredit Internasional	125
	7) Mahasiswa Menjalankan Wirausaha	1.000
	8) Instrumen Kompetensi Lulusan	12
	9) Lulusan Terdata dalam Sistem Informasi Terintegrasi	200.000
	10) Layanan Sarana dan Prasarana	1
	11) Layanan Dukungan Manajemen Satker	1
	12) Layanan Perkantoran	1

B. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pencapaian Sasaran Program, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020. Secara lebih rinci Perjanjian Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan disajikan pada Tabel 2.2 dan Tabel 2.3

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1.	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas	Jumlah program studi relevan	850
		Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional	20
		Jumlah program studi relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha/PT QS Rank 100	600
2.	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu satu tahun	200.000
		Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	625
		Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha	3.000
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap industry 4.0 (Merdeka Belajar)	51.500
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	7.500

Tabel 2.3 Tabel Kegiatan dan Anggaran Direktorat Belmawa TA 2020

No	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Rp 201.318.398.000,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berkewajiban untuk mencapai target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian kinerja tersebut. Capaian Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020

Sasaran Program	Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	1) Layanan Pelaksanaan PHLN	1	1	100
	2) Program Studi Relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha/PT QS Rank 100	765	949	124,1
	3) Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	42.520	48.455	113,9
	4) Program Studi Melaksanakan Inovasi Pembelajaran Digital	600	600	100
	5) Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi	1.400	1.450	103,6
	6) Mahasiswa Mengikuti Transfer Kredit Internasional	125	187	149,6
	7) Mahasiswa Menjalankan Wirausaha	1.000	1.038	103,8
	8) Instrumen Kompetensi Lulusan	12	28	233
	9) Lulusan Terdata dalam Sistem Informasi Terintegrasi	200.000	120.153	60,1
	10) Layanan Sarana dan Prasarana	1	1	100
	11) Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	100
	12) Layanan Perkantoran	1	1	100

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan selanjutnya dideskripsikan dan dinarasikan pada bagian berikut ini. Setiap Indikator Kinerja Kegiatan dideskripsikan aspek konsep, pengertian, dasar hukum, target dan realisasi capaian, kendala dan solusi/pemecahannya, dan dilengkapi dokumen pendukung (tabel, grafik, bagan, dan foto).

Indikator Kinerja Kegiatan 1: Layanan Pelaksanaan PHLN

Closing Account ADB Loan 2928-INO dan Grant 0343-INO(EF): Polytechnic Education Development Project

Indonesia membutuhkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk mendukung transformasi menjadi negara maju pada tahun 2025. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Indonesia menetapkan pusat pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang mencakup semua aspek (inclusive) di seluruh Indonesia dan memperluas pembangunan ke daerah yang lebih miskin. Ada tiga elemen strategis, yaitu (i) percepatan pembangunan di enam koridor ekonomi : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara, dan Papua - Kepulauan Maluku; (ii) peningkatan keterhubungan nasional; dan (iii) penguatan sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan, dan kemampuan teknologi, yang merupakan persyaratan untuk keberlanjutan, percepatan dan pertumbuhan lingkungan hijau.

Untuk mendukung hal tersebut diatas, pada tanggal 21 Nopember 2012, Asian Development Bank telah menyetujui pinjaman sebesar US\$ 75 juta (ADB No. 2928-INO) dan bantuan hibah sebesar US\$ 4,95 juta pemerintah Kanada (ADB No. 0343-INO) kepada Pemerintah Indonesia untuk membiayai Polytechnic Education Development Project (PEDP) atau Pengembangan Mutu Pendidikan Politeknik (PMPP). Tujuan proyek ini untuk meningkatkan mutu pendidikan politeknik dan mengembangkan kapasitas Politeknik agar menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat khususnya pada lima sektor prioritas (Infrastruktur, Agroindustri, Pariwisata, Manufaktur dan Pertambangan) serta membangun kemitraan industri sehingga dapat berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia sesuai dengan koridor ekonomi yang telah ditetapkan. Sebagai pendukung untuk melancarkan kegiatan proyek, pemerintah Indonesia akan menyediakan dana pendamping sebesar US\$ 16,7 juta, terutama untuk membiayai pengembangan kapasitas (pendidikan bergelar untuk pengajar politeknik), manajemen proyek, pajak dan bea. Jumlah nilai proyek keseluruhan menjadi US\$ 96,65 juta. Proyek PEDP dinyatakan efektif pada tanggal 7 Januari 2013 dan dijadwalkan selesai pada tanggal 30 Juni 2018. Namun demikian penyelesaian tersebut terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19 dimana jadwal yang semula akan selesai menjadi mundur hingga 31 Desember 2020 dikarenakan koordinasi yang tertunda antara EA, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Asian Development.

Adapun urutan rencana kegiatan dalam rangka Closing Account ADB Loan 2928-INO dan Grant 0343-INO(EF): Polytechnic Education Development Project adalah seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Closing Account ADB Loan 2928-INO dan Grant 0343-INO(EF)

No.	Kegiatan
A.	Konsolidasi Laporan Keuangan TA 2019
B.	Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi TA 2019
C.	Penyelesaian WA Loan dan Grant
D.	Penyelesaian Refund Loan
E.	Partial Loan Cancellation
F.	Pendampingan Audit Loan dan Grant BPK TA 2019 (periode Januari-Desember 2019)
G.	Penyusunan Laporan Keuangan Penutup PEDP (18 bulan)
H.	Tindak Lanjut atas LHP BPK TA 2019 (periode Januari-Desember 2019)
I.	Penyelesaian Tindak Lanjut temuan Loan dan Grant BPK TA 2015-2018
J.	Finalisasi Project Completion Report PMU
K.	ADB Project Completion Report

A. Konsolidasi Laporan Keuangan TA 2019

1. Sudah dilaksanakan rekonsiliasi Realisasi Keuangan TA 2019 dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB Kemkeu di bulan Januari 2020
2. Sudah dilaksanakan rekonsiliasi Realisasi Keuangan TA 2019 dengan PIU Politeknik di bulan Februari 2020

B. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi TA 2019

1. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi TA 2019 di bulan Februari 2020
2. Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasi TA 2019 ke BPK di bulan Februari 2020

C. Penyelesaian WA Loan dan Grant

1. Proses Withdrawal Application (WA) atas realisasi Loan dan Grant TA 2019 yang belum dipertanggungjawabkan ke ADB di bulan Maret – Juni 2020
2. Proses PCSS correction ke ADB di bulan Maret – Juni 2020
3. Proses PCUS zero to balance ke ADB Maret – Juni 2020

D. Penyelesaian Refund Loan

1. Proses refund loan ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPB Kemkeu di bulan April – Agustus 2020
2. Koodinasi dan konfirmasi serta validasi atas pengembalian/ setor Kas Negara dengan PIU dan Dit. PKN DJPB Kemkeu Juni 2020
3. Pengembalian sisa loan ke ADB di bulan Agustus 2020

4. Penutupan Reksus di BI di bulan Agustus 2020
- E. Partial Loan Cancellation
1. Pengajuan loan cancellation ke Bappenas dan DJPPR Kemkeu di bulan Mei 2020
 2. Proses loan cancellation DJPPR Kemkeu ke ADB (Mei-November 2020)
 3. Konfirmasi jawaban ke DJPPR atas partial cancellation loan yang diajukan ke ADB (November-Desember 2020)
- F. Pendampingan Audit Loan dan Grant TA 2019 (periode Januari-Desember 2019)
1. Penyampaian informasi dan data ke BPK (auditor: Auditor Utama Keuangan Negara III/AKN III)
- G. Penyusunan Laporan Keuangan (LK) Penutup PEDP (18 bulan)
1. Penyusunan perbaikan LK Penutup PEDP berdasarkan LHP TA 2019 (Periode Januari-Desember 2019)
 2. Penarikan data update data LFIS dan GFIS dalam rangka melengkapi pertanggungjawaban atas loan dan grant untuk Withdrawal Application/WA per Januari – Juni 2020 untuk SP2D TA 2019 yang belum dibebankan ke Reksus.
 3. Menyusun LK Penutup PEDP periode 18 bulan/ per Agustus 2020 setelah dilakukan refund ke ADB oleh Dit. PKN DJPB Kemkeu serta telah dilakukan penutupan Reksus di BI oleh Dit. PKN DJPB Kemkeu.
- H. Tindak Lanjut atas LHP TA 2019 (periode Januari-Desember 2019)
1. Koordinasi penyelesaian Tindak Lanjut LHP TA 2019 (PMU dan Politani Negeri Pangkep)
 2. Penyampaian Tindak Lanjut dan LK Penutup PEDP (per Agustus 2020) ke BPK (AKN VI) pada November 2020
 3. ADB menunggu opini dari BPK atas LK Penutup PEDP
- I. Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Loan dan Grant BPK TA 2015-2018
1. Koordinasi PIU dan PMU dalam rangka penyelesaian atas Tindak Lanjut temuan loan dan grant untuk periode TA 2015-2018 yang belum ditindaklanjuti.
 2. TL Temuan BPK khususnya 2015-2018
 3. PMU ada 3:
 - Pengembalian kelebihan biaya transport lokal study visit Kanada (sudah disetor ke Kas Negara)
 - Pedoman Verifikasi dan Analisis Kebutuhan Dalam Rangka Implementasi PEDP (yang berisi pedoman verifikasi Proc Plan PIU dan Pengajuan Peralatan PIU) (sudah selesai)
 - PNJ ada 2 TL administratif dan 1 surat pernyataan ketersediaan ruangan (sudah selesai & lengkap)

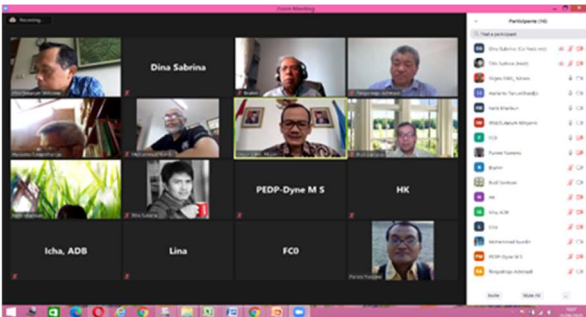
- Polman Bandung ada 1 TL administratif (sudah selesai)

J. Finalisasi Project Completion Report PMU

1. Update data Project Completion Report yang telah disusun oleh PMU pada tahun 2019 dengan update per Mei 2020

K. ADB Project Competition Report

1. Koordinasi Penyusunan ADB Project Completion Report (online review dengan 13 PIU politeknik sampling (Poli Batam, Polban, Politani Kupang, Poli LPP, Polnes, PNB, PNUP, Polnep, PNJ, Polije, Polimdo, PCR, Poli ATMI) dan PMU.
2. MoU ADB PCR sudah ditandatangani per December 2020.



Gambar 2. Kick off Meeting Penyusunan PCR ADB dengan Dirjen Dikti



Gambar 3. Workshop Rekonsiliasi Laporan Keuangan PEDP TA 2019 dengan PIU Politeknik

Capaian Proyek The Support to the Development of Higher Education Project (Proyek 7in1)

Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa, tujuh universitas yang tersebar di empat pulau besar di Indonesia, yaitu Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan Universitas Negeri Gorontalo (UNG) di Sulawesi, Universitas Tanjungpura (Untan) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Kalimantan, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Jawa, dan Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) di Sumatera (Gambar 1) menyusun program pembangunan dan pengembangan pendidikan tinggi secara bottom-up dengan menekankan pada keunggulan dan kekhasan universitas masing-masing, serta mengembangkan program peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang koheren dan berkelanjutan. Program pembangunan dan pengembangan ini disusun dalam suatu konsorsium proyek dengan nama The Support to the Development of Higher Education Project yang anggotanya terdiri dari Unesa, UNY, UNG, Untan, Unsrat dan ULM yang didanai oleh Islamic Development Bank (IsDB), dan Development of Education in

Seven Universities Project di Unsyiah yang didanai Saudi Fund and Development (SFD), dengan didukung dana pendamping dari pemerintah Indonesia. Kedua proyek ini disingkat sebagai Proyek 7in1.



Gambar 4. Gambar Lokasi Sebaran Tujuh Universitas dalam Proyek 7in1

Tabel 3.4 Profil Proyek 7in1

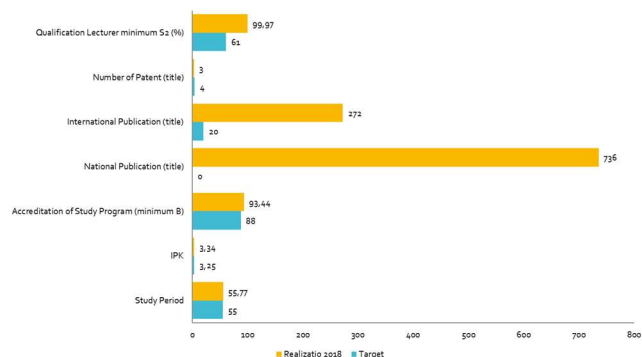
No	Description	The Support to The Development of Higher Education Project	Development of Education in Seven University Project
1.	Source of Fund	IDB	SFD
2.	Loan Agreement	IND-0168	9/612
3.	Signed Date	January 02, 2014	March 12, 2014
4.	Register Number	10879501	21685701
5.	Effective Date	April 14, 2014	September 12, 2014
6.	Closing Date	October 27, 2018	December 31, 2018
	1 st Loan Extension Date	October 27, 2019	December 31, 2019
	2 nd Loan Extension Date	June 30, 2020	June 30, 2020
	3 rd Loan Extension Date	June 30, 2021	30 March 2021
7.	Total Amount	USD174,010,000	USD35,000,000
8.	Executing Agency	Directorate of Learning and Student Affairs Directorate General of Higher Education Ministry of Education and Culture	

Tabel 3.3 Serapan Anggaran SFD Loan sampai dengan 2020

Komponen	Anggaran	Nilai Kontrak	Final Disbursement		Saving
	(USD)	(USD)	(USD)	%	
A. Improving the Access to the Universities	25.452.971,80	23.676.465,09	23.676.465,09	100,00%	1.776.506,71
1. Construction of New Buildings***	24.197.596,00	23.676.465,09	23.676.465,09	100,00%	521.130,91
2. Renovation	-	-	-	-	-
3. Supporting Infrastructure	1.255.375,80	-	-	-	1.255.375,80
4. Furniture and Fixtures	-	-	-	-	-
B. Improving Quality to the Universities	4.852.059,00	5.082.626,57	5.050.250,61	100,00%	-
1. Curriculum Development Program	-	-	-	-	-
2. Equipment***	4.852.059,00	5.082.626,57	5.050.250,61	100,00%	-
3. Training Program (staffs development)	-	-	-	-	-
4. E-learning (including digital library)	-	-	-	-	-
5. Books & Journal	-	-	-	-	-
6. Research Grants	-	-	-	-	-
C. Support to Project Management	1.513.151,00	638.565,40	678.728,36	100,00%	834.422,64
1. DEDC	616.000,00	190.293,11	194.461,67	100,00%	421.538,33
2. PMSC***	760.000,00	324.149,52	302.608,76	100,00%	457.391,24
3. EQC***	137.151,00	124.122,77	181.657,92	100,00%	-
4. Start Up Workshop, Mid Term Review	-	-	-	-	-
5. FAC	-	-	-	-	-
6. PMU Expert	-	-	-	-	-
7. Project Implementation Unit	-	-	-	-	-
Jumlah	31.818.181,80	29.397.657,06	29.405.444,06	100,00%	2.610.929,35
Kontijensi	3.181.818,20	-	-	-	3.181.818,20
Jumlah Pendanaan SFD (Persentase terhadap kontrak)	35.000.000,00	29.397.657,06	29.405.444,06	100,00%	5.594.555,94
Persentase Anggaran terhadap Final Disbursement	35.000.000,00		29.405.444,06	84,02%	

Tabel 3.5 Capaian Proyek SFD untuk Universitas Syiah Kuala

Komponen	Status
Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)	Selesai
Project Management and Supervision Consultant (PMSC)	Selesai
Equipment Consutant (EQC)	Selesai
Civil Work	Selesai dan sudah dimanfaatkan
Equipment	Selesai dan sudah dimanfaatkan
Elearning Equipment	-
Soft Program	selesai
Project Completion Report	Finalisasi Draft Laporan



Gambar 5. Gedung Universitas Syiah Kuala

Tabel 3.6 Serapan Anggaran IsDB loan sampai dengan 2020

Tabel 3.7 Capaian Proyek IsDB untuk 6 Universitas

Komponen	Status					
Detailed Engineering Design Consultant (DEDC)	Selesai					
Project Management and Supervision Consultant (PMSC)	Selesai					
Equipment Consultant (EQC)	Masih Berjalan					
Financial Auditing Consultant FAC	Masih Berjalan					
IC Procurement Specialist	Selesai					
IC Financial Management Specialist	Selesai					
IC Information and Communication Technology	Selesai					
PMU Expert Project Management Expert	Proses Pengadaan					
PMU Expert Professional Writer Expert	Proses Pengadaan					
PMU Expert Civil Engineering Expert	Proses Pengadaan					
Komponen	Status					
	Univ. Negeri Gorontalo	Univ. Sam Ratulangi	Univ. Tanjungpura	Univ. Lambung Mangkurat	Univ. Negeri Surabaya	Univ. Negeri Yogyakarta
<i>Civil Work</i>	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan
<i>Equipment</i>	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan
<i>Elearning Equipment</i>	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	Selesai dan sudah dimanfaatkan	-
<i>Soft Program</i>	Selesai	Selesai	Selesai	Selesai	Selesai	Selesai
<i>Additional Scope</i>	Proses pengadaan	Proses pengadaan	-	-	-	-
<i>Project Completion Report</i>	-	-	Penyusunan Draf PCR	Penyusunan Draf PCR	Penyusunan Draf PCR	Penyusunan Draf PCR

Gedung di 6 Universitas



Gambar 6. Gedung Student Activity Centre di Unesa



Gambar 8. Gedung Perpustakaan di UNG



Gambar 9. Gedung Perpustakaan di Untan



Gambar 11. Gedung Student Center di ULM



Gambar 7. Gedung Fakultas Hukum di Unsrat



Gambar 10. Gedung Health and Sport Center di UNY

Tabel 3.8 Pekerjaan Tambah di PIU Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri

No	Universitas	Additional Scope	Budget (Rp)	Status
1	Universitas Negeri Gorontalo	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Landscape	IDR 60,624,000,000	Pengumuman lelang sudah dilakukan tanggal 10 November 2020 untuk UNG dan 6 November 2020 untuk Unsrat.
2	Universitas Sam Ratulangi	Pengadaan Peralatan Laboratorium Fakultas Teknik	IDR 39,863,646,500	Pembukaan dokumen lelang sudah dilakukan pada tanggal 11 November 2020 untuk UNG dan 22 Desember 2020 untuk Unsrat. BER UNG sudah dikirimkan ke IsDB pada tanggal 21 Desember 2020 dan untuk BER Unsrat masih dalam proses finalisasi oleh pojka
TOTAL			IDR 100.487.646.500	
			USD 6.930.183 (kurs 14.500)	

Tabel 3.9 Pekerjaan Pengadaan PMU Expert

No	PMU Expert	Durasi	Status
1	Professional Writer Expert	6 bulan	TOR PMU Expert sudah disetujui oleh IsDB melalui NOL tanggal 23 Oktober 2020 dan pengumuman lelang di koran nasional sudah dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2020.
2	Civil Engineering Expert	6 bulan	
3	Project Management Expert	6 bulan	Pembukaan dokumen lelang sudah dilakukan pada tanggal 30 November 2020 dan proses evaluasi telah dilakukan oleh pokja Laporan hasil evaluasi sudah dikirimkan ke IsDB untuk memperoleh persetujuan pada tanggal 7 Desember 2020

Hambatan

- Ada pembayaran yang sudah dilakukan pada tahun 2020 tetapi SP3 belum keluar (elearning Unsrat Termin 1-3)
- Koordinasi dan monitoring pelaksanaan implementasi project terbatas karena hanya via online
- Kegiatan Additional Scope (New Package) di Unsrat dan UNG sangat kritis waktu pekerjaan sehubungan dengan waktu closing date (30 Juni 2021)

Tindakan

- Melakukan revisi DIPA melalui metode luncuran untuk SP3 yang tidak terbit di tahun 2020
- Mengintensifkan monitoring secara online
- Time Line pekerjaan perlu inovasi percepatan dan meningkatkan pengawasan dan koordinasi

Indikator Kinerja Output Kegiatan 2: Program Studi Relevan KKNI/Industri 4.0/Dunia Usaha/PT QS Rank 100

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Berdasarkan hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Mendikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot SKS tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi.

Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya sebuah keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdikari. Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini, program studi mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan implementasinya. Untuk itu diperlukan panduan pengembangan kurikulum dan model kerjasama untuk implementasi MBKM.

Dalam rangka mendukung keberhasilan program studi dalam menerapkan kurikulum yang sejalan dengan kebijakan MBKM, diperlukan adanya model kerja sama kurikulum antara program studi dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Dasar Hukum yang dirujuk untuk pelaksanaan program ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Tujuan pelaksanaan program ini adalah:

- 1) Meningkatkan jumlah program studi yang menerapkan program MBKM;
- 2) Memfasilitasi program studi untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebijakan MBKM;
- 3) Mendorong program studi untuk melaksanakan kerja sama dengan mitra dalam rangka implementasi kurikulum program MBKM;
- 4) Mendapatkan model-model kerja sama antara program studi dengan mitra dalam implementasi kebijakan MBKM untuk dapat menjadi rujukan;
- 5) Menghasilkan pengalaman baik (*good practices*) di perguruan tinggi dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum program MBKM yang memiliki capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNI dan SN-Dikti.

Indikator Kinerja Kegiatan, target dan realisasinya pada tahun 2020 dapat digambarkan pada table 3.10 berikut.

Tabel 3.10 Indikator Kinerja Program Studi Melakukan Kerja Sama Kurikulum dengan Dunia Industri/Dunia Usaha/PT QS Rank 100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Studi Melakukan Kerja Sama Kurikulum dengan Dunia Industri/Dunia Usaha/PT QS Rank 100	Jumlah Program Studi Melakukan Kerja Sama Kurikulum dengan Dunia Industri/Dunia Usaha/PT QS Rank 100	600 Prodi	605 Prodi	100,83%

Seperti yang telah disampaikan pada tabel diatas, bahwa target dari Program Studi Melakukan Kerja Sama Kurikulum dengan Dunia Industri/Dunia Usaha/PT QS Rank 100 adalah sebanyak 600 prodi. Namun dalam pelaksanaannya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dapat memberikan bantuan kepada sebanyak 605 prodi yang terdiri dari 184 perguruan tinggi yang tersebar secara merata dari wilayah LLDikti 1 hingga 15. Dengan demikian, capaian kinerja dari program ini diatas target yang telah ditetapkan yakni 100,83%. Peningkatan capaian diatas target ini dikarenakan pada saat pengajuan program bantuan, terdapat beberapa program studi yang mengajukan anggaran dibawah angka maksimal yang telah ditetapkan. Sehingga terdapat dana sisa yang dapat dialokasikan untuk menambah pemberian bantuan kepada 5 prodi diluar target yang telah ditetapkan. Kondisi ini tentunya sangat positif dalam membantu semakin banyak prodi untuk dapat melakukan kerja sama dengan mitra diluar prodinya dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Sampai diserahkan laporan akhir program bantuan prodi menerapkan kerja sama kurikulum MBKM ini pada tanggal 10 Desember 2020, telah dihasilkan 5.217 dokumen kerja sama antara prodi dengan mitra dalam rangka implementasi program MBKM. Disamping itu, para prodi penerima program bantuan ini juga melakukan reorientasi kurikulum untuk mendukung MBKM serta disusunnya berbagai dokumen penunjang pelaksanaan program MBKM yang akan siap mereka implementasikan pada semester genap tahun ajaran 2020/2021.

Dalam Indikator Kinerja Program Studi Melakukan Kerja Sama Kurikulum dengan Dunia Industri/Dunia Usaha/PT QS Rank 100, selain memberikan program bantuan dana kepada program studi dalam rangka menerapkan kerja sama kurikulum MBKM, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga melaksanakan sosialisasi kebijakan MBKM di bulan Juni, sosialisasi program bantuan kerja sama kurikulum MBKM di awal bulan Agustus, serta bimbingan teknis pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi untuk mendukung MBKM di bulan November hingga Desember. Dikarenakan kondisi pandemi covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020, hampir seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring.

Kendala yang dihadapi:

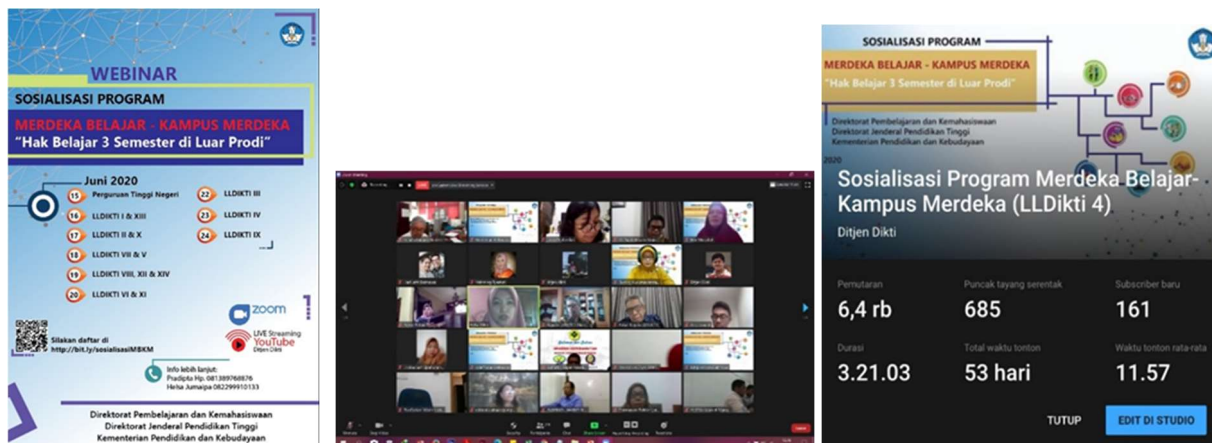
- 1) Keterlambatan kepastian pagu anggaran dalam RKAKL.
- 2) Program ini merupakan program baru, sehingga masih mencari konsep dan model bantuan yang tepat.
- 3) Adanya pandemi Covid-19 yang membuat keterbatasan dalam koordinasi.
- 4) Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka baru diluncurkan pada awal tahun, sehingga masih banyak perguruan tinggi yang baru akan mempersiapkan implementasinya.
- 5) Jumlah anggaran yang cukup besar namun waktu pelaksanaannya cukup terbatas.
- 6) Jumlah proposal yang masuk sangat banyak sedangkan tim pengembang program sedikit.

Alternatif mengatasi kendala:

- 1) Melakukan diskusi yang intensif dengan tim pengembang program yang merupakan tim pakar kurikulum dari beberapa perguruan tinggi ternama untuk menentukan konsep dan model program bantuan yang akan dilaksanakan.
- 2) Memanfaatkan platform daring/online untuk berkoordinasi secara intensif.
- 3) Fokus pelaksanaan program bantuan yang dilaksanakan pada tahun ini adalah untuk mempersiapkan implementasi MBKM.
- 4) Menyusun panduan program sejak awal tahun sehingga waktu pelaksanaan programnya bisa lebih Panjang.
- 5) Melakukan penambahan tim reviewer proposal yang terdiri dari dosen-dosen dan merupakan penggiat kurikulum di masing-masing perguruan tingginya

Saran pengembangan (rekomendasi)

Pelaksanaan Program Studi Melakukan Kerja Sama Kurikulum dengan Dunia Industri/Dunia Usaha/PT QS Rank 100 di tahun yang akan datang dibuat panduannya sejak awal tahun sehingga proses pelaksanaan bantuan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, proses pelaksanaannya juga sudah harus mengarah ke implementasi program MBKM bukan hanya sekedar merencanakan saja.



Gambar 12. Kegiatan Sosialisasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka secara Daring



Gambar 13. Kegiatan Bimtek Pengembangan KPT untuk Mendukung MBKM secara Blended di Universitas Negeri Semarang



Gambar 14. Kegiatan Bimtek Pengembangan KPT untuk Mendukung MBKM secara *Blended* di Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Indikator Kinerja Kegiatan 3: Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja di era revolusi industri 4.0 telah membuat kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi. Kebijakan baru tersebut adalah “Merdeka Belajar - Kampus Merdeka” yang terdiri dari empat paket kebijakan: Pertama, memberikan otonomi kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam *QS Top 100 World Universities* dapat membuka dan menutup program studi; Kedua, memberikan kesempatan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH); Ketiga, Akreditasi prodi dapat diperpanjang secara otomatis selama tidak ada laporan penurunan kualitas dari masyarakat ataupun dari pemerintah; dan Ke-empat adalah memberikan hak kepada mahasiswa apabila ingin mengambil mata kuliah di luar program studi.

Kebijakan keempat tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT dapat meliputi pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan proyek independen yang semua kegiatan tersebut diatas harus dibimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

Dalam rangka mendukung implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, diperlukan perguruan tinggi

yang dapat dijadikan model pelaksanaannya. Untuk itu, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuat program bantuan Program Studi Menjadi *Center Of Excellence (CoE)* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, khususnya program “hak belajar tiga semester di luar program studi” diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat serta memperkuat capaian pembelajaran yang dimiliki oleh mahasiswa. Program bantuan ini bertujuan memberikan insentif kepada PT untuk pengembangan Program Studi Menjadi *CoE* dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, antara lain:

- 1) memberikan layanan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam skema desain kebijakan akademik, dan implementasi;
- 2) meningkatkan wawasan keilmuan tentang pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi lain dalam satu PT sebagai perekat kebersamaan dalam mendalami keilmuan;
- 3) meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi mahasiswa di PT, yang ditandai dengan meningkatnya mutu penyelenggaraan pendidikan akademik melalui pengembangan kurikulum dan penjaminan mutu yang menunjang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- 4) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar lain melalui kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar program studi.;
- 5) mendukung pembelajaran transdisiplin sebagai pendekatan kolektif, memanfaatkan ilmu, pengetahuan dan kemampuan analisis dalam memahami sistem yang lebih besar dan kompleks;
- 6) internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan/atau dunia industri.

Indikator Kinerja Kegiatan, target dan realisasinya pada tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.11 Indikator Kinerja Program Studi Menjadi Model Center of Excelent Kampus Merdeka

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Studi Menjadi Model Center of Excelent Kampus Merdeka	Jumlah Program Studi Menjadi Model Center of Excelent Kampus Merdeka	30 Prodi	33 Prodi	110%

Pada tabel di atas telah disebutkan bahwa target dari Program Studi Menjadi Model *Center of Excellence* Kampus Merdeka adalah sebanyak 30 prodi. Namun dalam pelaksanaannya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dapat memberikan bantuan kepada sebanyak 33 prodi yang terdiri dari 27 perguruan tinggi. Dengan demikian, capaian kinerja dari program ini diatas target yang telah ditetapkan yakni sebesar 110%. Peningkatan capaian diatas target ini dikarenakan pada saat pengajuan program bantuan, terdapat beberapa program studi yang mengajukan anggaran dibawah angka maksimal yang telah ditetapkan. Sehingga terdapat dana sisa yang dapat dialokasikan untuk menambah pemberian bantuan kepada 3 prodi diluar target yang telah ditetapkan. Kondisi ini tentunya sangat baik dalam mendorong semakin banyak prodi yang dapat menjadi model *Center of Excellence* Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (CoE MBKM). Program bantuan prodi menjadi model CoE MBKM pada tahun ini terbagi menjadi dua skema, yakni skema 1 yang merupakan bantuan untuk tahapan perancangan dan perencanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka baik pada tingkat perguruan tinggi, fakultas dan program studi serta skema 2 yang merupakan praktik baik pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Kami membagi program ini menjadi dua skema seperti diatas dikarenakan kami menyadari bahwa program MBKM yang baru diluncurkan oleh Mendikbud pada awal tahun 2020 ini belum banyak dapat diimplementasikan oleh perguruan tinggi dan mereka baru pada tahapan merekonstruksi kurikulumnya guna mendukung program tersebut. Sehingga kami juga memberikan kesempatan untuk dapat membantu prodi dalam rangka mempersiapkan implementasi program MBKM tersebut. Berikut kami sampaikan data table 3.12 penerima program bantuan prodi menjadi model CoE MBKM tahun 2020.

Tabel 3.12 Prodi penerima program bantuan prodi menjadi model CoE MBKM tahun 2020

No	Nama Perguruan Tinggi	Skema	Nama Program Studi	Nominal (Rp)
1	Institut Pertanian Bogor	1	Ilmu Keluarga dan Konsumen	79.950.000
2	Institut Seni Indonesia Surakarta	1	Etnomusikologi	79.746.500
3	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	1	Teknik Geofisika	80.000.000
4	Universitas Bandar Lampung	1	Manajemen	79.900.000

5	Universitas Brawijaya	1	Sistem Informasi	80.000.000
6	Universitas Ciputra	1	Manajemen	77.800.000
7	Universitas Gadjah Mada	1	Manajemen	80.000.000
8	Universitas Islam Indonesia	1	Arsitektur	79.903.000
9	Universitas Islam Malang	1	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	80.000.000
10	Universitas Jambi	1	Ekonomi Pembangunan	80.000.000
11	Universitas Muhammadiyah Palembang	1	Manajemen	80.000.000
12	Universitas Muhammadiyah Ponorogo	1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	80.000.000
13	Universitas Negeri Gorontalo	1	Pendidikan Kimia	80.000.000
14	Universitas Negeri Semarang	1	Pendidikan Biologi	80.000.000
15	Universitas Negeri Surabaya	1	Pendidikan Geografi	80.000.000
16	Universitas Negeri Yogyakarta	1	Pendidikan Matematika	80.000.000
17	Universitas Nusa Cendana	1	Peternakan	80.000.000
18	Universitas Padjadjaran	1	Sastra Jepang	80.000.000
19	Universitas Pendidikan Ganesha	1	Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	80.000.000
20	Universitas Pendidikan Indonesia	1	Pendidikan Akuntansi	80.000.000
21	Universitas Sebelas Maret	1	Pendidikan Biologi	80.000.000
22	Universitas Syiah Kuala	1	Pendidikan Dokter Hewan	80.000.000
23	Universitas Tanjungpura	1	Pendidikan Kimia	80.000.000
24	Universitas Telkom	1	Informatika	73.935.000
25	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	2	Teknik Industri	112.550.000
26	Universitas Ciputra	2	Desain Komunikasi Visual	117.725.000
27	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	2	Ilmu Komunikasi	119.800.000
28	Universitas Negeri Semarang	2	Kesehatan Masyarakat	120.000.000
29	Universitas Negeri Yogyakarta	2	Pendidikan Teknik otomotif	120.000.000
30	Universitas Pendidikan Ganesha	2	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	120.000.000
31	Universitas Pendidikan Nasional	2	Ilmu Hukum	119.812.000
32	Universitas Sebelas Maret	2	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	120.000.000
33	Universitas Syiah Kuala	2	Peternakan	120.000.000
	Total			2.981.121.500

Dalam Indikator Kinerja Program Studi Menjadi *Model Center of Excellence* Kampus Merdeka, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bermaksud untuk menjadikan mereka model pelaksanaan MBKM yang merupakan program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kedepannya diharapkan prodi-prodi yang telah mendapatkan bantuan tersebut dapat menjadi rujukan bagi prodi lainnya untuk mengimplementasikan program MBKM, sehingga semakin banyak prodi yang akan menerapkan program MBKM guna mencapai tujuan Pendidikan yang lebih baik lagi.

Kendala yang dihadapi:

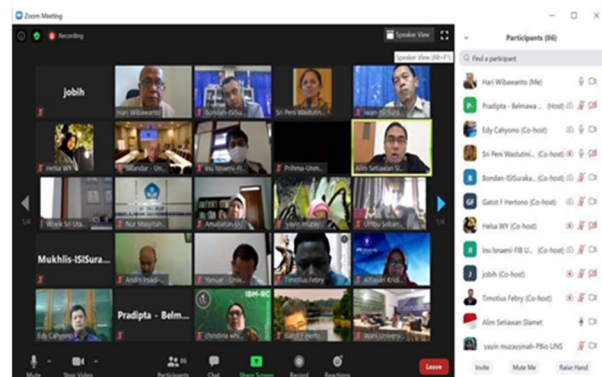
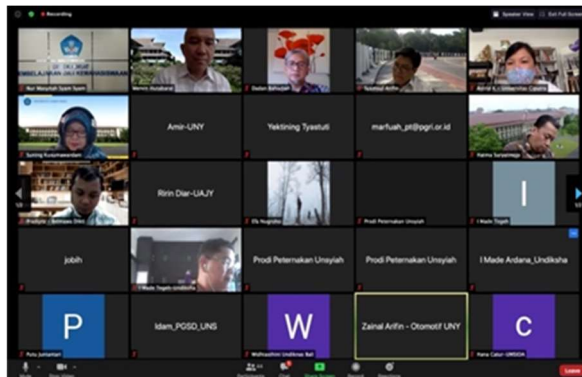
- 1) Keterlambatan kepastian pagu anggaran dalam RKAKL.
- 2) Program ini merupakan program baru, sehingga masih mencari konsep dan model bantuan yang tepat.
- 3) Adanya pandemi Covid-19 yang membuat keterbatasan dalam koordinasi.
- 4) Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka baru diluncurkan pada awal tahun, sehingga masih banyak perguruan tinggi yang baru akan mempersiapkan implementasinya.

Alternatif mengatasi kendala:

- 1) Melakukan diskusi yang intensif dengan tim pengembang program yang merupakan tim pakar kurikulum dari beberapa perguruan tinggi ternama untuk menentukan konsep dan model program bantuan yang akan dilaksanakan.
- 2) Memanfaatkan platform daring/online untuk berkoordinasi secara intensif.
- 3) Fokus pelaksanaan program bantuan yang dilaksanakan pada tahun ini adalah untuk mempersiapkan implementasi MBKM.
- 4) Menyusun panduan program sejak awal tahun sehingga waktu pelaksanaan programnya bisa lebih panjang.

Saran pengembangan (rekomendasi)

Program Studi Menjadi *Model Center of Excellence* Kampus Merdeka di tahun yang akan datang dibuat panduannya sejak awal tahun sehingga proses pelaksanaan bantuan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan dengan jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, fokus pelaksanaannya juga mengarah kepada praktik baik implementasi program MBKM.





Gambar 15. Kegiatan Bimtek bagi Para Penerima Program Bantuan CoE MBKM secara Daring

Indikator Kinerja Kegiatan 4: Program Studi Melaksanakan Inovasi Pembelajaran Digital

Inovasi Pembelajaran Digital merupakan ragam bentuk obyek belajar dapat berupa teks, audio, visual, audio visual, animasi dan simulasi yang dikemas sedemikian rupa dalam berbagai jenis dan format media digital. Ragam modul digital yang bersifat sebagai sumber belajar terbuka (open education resources), merupakan salah satu unsur penting dalam upaya menerapkan inovasi pembelajaran digital.

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, kemampuan SDM dalam menguasai literasi baru menjadi hal yang penting dan perlu. Digitalisasi dan otomatisasi dalam banyak aspek di kehidupan, mendorong SDM untuk dapat secara berkelanjutan dan secara terus menerus beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk mampu bersaing dalam era digital juga perlu ditingkatkan dan dikembangkan. SDM Indonesia dituntut untuk mampu beradaptasi dan melakukan peningkatan kapasitas (*capacity building*) untuk mampu menguasai literasi-literasi baru memiliki literasi baru (*new literacy*), diantaranya adalah literasi teknologi (*technology literacy*), literasi digital (*digital literacy*) dan literasi kemanusiaan (*human literacy*). Daya saing bangsa, salah satunya ditentukan oleh kompetensi literasi baru ini.

Menanggapi hal tersebut, perguruan tinggi dituntut untuk mampu menghasilkan lulusan yang kompetitif dan memiliki kemampuan literasi baru. Literasi digital, misalnya, adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi (*big data*) dalam dunia digital dewasa ini. Literasi teknologi, adalah kemampuan memahami cara kerja teknologi seperti pemrograman (*coding*), inteligensi buatan (*artificial intelegensi*), prinsip rekayasa teknologi, dan lain-lain. Sementara literasi manusia adalah kemampuan untuk berhubungan dengan sesama manusia seperti komunikasi, desain, kepemimpinan, kewirausahaan dan soft skills lainnya. Oleh karenanya, Kemendikbud harus mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan inovasi-inovasi pembelajaran yang dapat digunakan untuk mendukung menciptakan lulusan yang kompeten dan mampu bersaing secara global dan kontekstual. Kemampuan dalam melakukan analisis dan mengolah data, serta memiliki kompetensi yang diakui secara global menjadi tuntutan yang harus dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi dalam membekali lulusannya untuk dapat beradaptasi secara baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban membuat kebijakan, regulasi, pedoman, serta upaya upaya memfasilitasi perguruan tinggi untuk dapat melakukan perubahan paradigma pembelajaran modern di perguruan tinggi dan menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran digital (berbasis ICT) serta menerapkan prinsip-prinsip implementasi sistem pendidikan jarak jauh dan atau modus pembelajaran jarak jauh (e-learning dalam arti yang seuas-luasnya seperti *online learning*, *blended learning*, *flipped learning*, dll). Dengan demikian melalui output perguruan tinggi yang menerapkan inovasi pembelajaran digital, dapat meningkatkan perluasan akses, mutu, serta relevansi pendidikan tinggi di era industri 4.0.

Tujuan

Untuk mendorong perguruan tinggi mengembangkan dan menerapkan model-model inovasi pembelajaran digital dalam konteks pendidikan reguler maupun pendidikan jarak jauh.

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 4) Permendikbud No. 50 tahun 2014, tentang Sistem Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi
- 5) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6) Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

Indikator Kinerja Kegiatan, target dan realisasinya pada tahun 2020 dapat digambarkan pada table 3.13 berikut.

Tabel 3.13 Indikator Kinerja Program Studi Melaksanakan Inovasi Pembelajaran Digital

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Studi Melaksanakan Inovasi Pembelajaran Digital	Jumlah Program Studi Melaksanakan Inovasi Pembelajaran Digital	600	600	100

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor tercapainya kinerja prodi melaksanakan inovasi pembelajaran digital. Dikarenakan semua proses pembelajaran dimasa pandemic ini dilaksanakan secara daring, sehingga mendorong program studi untuk menciptakan berbagai

inovasi dalam melakukan proses pembelajaran, khususnya pembelajaran yang memanfaatkan teknologi TIK.

Tercapainya target dan realisasi kinerja, dikarenakan koordinasi dan konsolidasi yang sangat baik antara tim yang terlibat didalamnya. Pandemi Covid-19 juga mendorong terciptanya inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Namun demikian, masih menjadi catatan dalam hal penjaminan mutu terhadap konten-konten inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Sehingga perlu disiapkan standar dan panduan terhadap konten inovasi pembelajaran digital, serta perlunya bimtek/workshop/sosialisasi yang lebih gencar, khususnya bagi perguruan tinggi dengan sumber daya yang terbatas.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung ketercapaian target/realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKP)

- 1) Penyusunan Rencana, Panduan, dan Instrumen
- 2) Sosialisasi Inovasi Pembelajaran Digital
- 3) Bimbingan Teknis Inovasi Pembelajaran Digital
- 4) Fasilitasi Prodi Menerapkan Inovasi Pembelajaran Digital
- 5) Evaluasi Program dan visitasi

Kendala yang dihadapi:

- 1) Keterlambatan kepastian pagu anggaran
- 2) Pandemi Covid-19
- 3) Target, satuan, dan anggaran kadang tidak sesuai

Alternatif mengatasi kendala:

- 1) Optimasi pemanfaatan TIK dalam melakukan koordinasi dan konsolidasi persiapan dan pelaksanaan program
- 2) Penyesuaian jadwal pelaksanaan program sesuai dengan ketersediaan anggaran
- 3) Optimasi kinerja tim internal dan eksternal dalam penyusunan panduan dan pedoman pembelajaran digital
- 4) Penyelenggaraan pelatihan pembelajaran daring secara masif dan terstruktur dengan menggunakan TIK
- 5) Sosialisasi penyelenggaraan fasilitasi bantuan pembiayaan inovasi pembelajaran digital.

Saran pengembangan (rekomendasi):

- 1) Kepastian anggaran lebih cepat
- 2) Jumlah anggaran, target, dan satuan harus sinkron

Indikator Kinerja Kegiatan 5: Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki standar kompetensi lulusan yang berdaya saing unggul. Maka Pemerintah menerbitkan aturan yang mengamanatkan uji kompetensi, yang mengatur :

- 1) Mahasiswa bidang kesehatan, Pendidikan kedokteran, dan Pendidikan Profesi Guru pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- 2) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- 3) Uji Kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- 4) Standar kompetensi kerja disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing dan ditetapkan oleh Menteri.
- 5) Mahasiswa pendidikan vokasi yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
- 6) Mahasiswa pendidikan profesi yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan, Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Maka perlu dilakukan peta kegiatan di kompetensi lulusan untuk pelaksanaan uji kompetensi di Tahun 2020.

Oleh karena itu pentingnya peningkatan mutu implementasi uji kompetensi nasional. Penguatan mutu standar uji kompetensi (soal, sumber daya manusia, sarana/prasarana dan sistem kelembagaan panitia) secara berkesinambungan. Penguatan kerja sama dengan berbagai stakeholders pendidikan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu sistem uji kompetensi nasional, dan untuk mendapatkan rekognisi internasional. Penguatan manajemen data uji kompetensi nasional sehingga dapat digunakan oleh pemerintah dan berbagai *stakeholders* untuk dasar kebijakan penjaminan mutu pendidikan dan pelayanan masyarakat pendidikan.

Penjaminan mutu (*quality assurance*) dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan memenuhi standar mutu dan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga produk yang dihasilkan memenuhi keinginan stakeholders. Dengan penjaminan mutu dapat dipastikan bahwa mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Jadi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam meningkatkan mutu lulusan mengupayakan pemenuhan standar dalam pelaksanaan uji kompetensi, salah satunya adalah

melakukan koordinasi mulai dari penyiapan soal (*item development, item review, expert review*, hingga pemaketan soal), penyiapan data peserta sesuai dengan PD-Dikti, menyiapkan infrastruktur pendukung pelaksanaan uji kompetensi (Standarisasi tempat uji kompetensi, workshop pengelola tempat uji kompetensi) yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan..

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan:

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4) UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- 5) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kesehatan
- 6) UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keperawatan
- 7) UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI
- 10) Permendikbud No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
- 11) Permendikbud No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan, target dan realisasinya pada tahun 2020 dapat digambarkan pada table 3.14 berikut.

Tabel 3.14 Indikator Kinerja Program Studi Menyelenggarakan Uji Kompetensi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Program Studi Menyelenggarakan Uji Kompetensi	Jumlah Program Studi Menyelenggarakan Uji Kompetensi	1.400	1.450	103,6%

Pelaksanaan Kegiatan Program Studi Menyelenggarakan Uji Kompetensi berjalan lancar yang dilaksanakan dalam beberapa periode untuk program profesi dokter dilaksanakan dalam 3 Periode uji (Februari – Maret, Agustus, dan November 2020), untuk program profesi dokter gigi dilaksanakan dalam 4 Periode (Januari, Februari, Oktober, dan November 2020), untuk bidang kesehatan dilaksanakan dalam 2 Periode (Juli – Agustus, Oktober – November 2020). dengan realisasi Kegiatan Program Studi Menyelenggarakan Uji Kompetensi sebanyak Seribu Empat ratus (1.400) Program Studi dengan persentasi capaian sebesar 100%.

Terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan Kegiatan Program Studi Menyelenggarakan Uji Kompetensi dikarenakan adanya Pandemi Covid – 19 dimana pembahasan sosial skala besar dilaksanakan mulai awal maret 2020 hingga akhir Juni 2020 sehingga dilakukan penundaan/perubahan jadwal penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagai contoh untuk program profesi dokter yang pada tahun lalu diselenggarakan dalam 4 periode, tahun ini hanya

diselenggarakan dalam 3 periode, kemudian untuk bidang kesehatan hanya diselenggarakan dalam 2 periode untuk mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Komite Nasional Uji Kompetensi Bidang Kesehatan dan Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi untuk menyiapkan Standar Pelaksanaan Uji Kompetensi dengan memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19. Untuk Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi dimana ada mahasiswa asing asal Malaysia, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bekerja sama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur melakukan pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) dilaksanakan di Universitas Putra Malaysia dan Kantor KBRI Kuala Lumpur.

Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMP2DG)

- Pelaksanaan UKMP2DG Periode I = 31 Januari – 1 Februari 2020
- Pelaksanaan UKMP2DG Periode II = 17 – 18 April 2020
- Pelaksanaan UKMP2DG Periode III = 25 Oktober 2020
- Pelaksanaan UKMP2DG Periode IV = 28 – 19 November 2020

Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)

- Pelaksanaan UKMPPD Periode I = 23 Februari 2020
- Pelaksanaan UKMPPD Periode II = 16 – 19 Agustus 2020
- Pelaksanaan UKMPPD Periode III = 14 – 16 November 2020

Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (UKNakes)

- Pelaksanaan UKNakes Periode I
 - a. Program Studi DIII Kebidanan, DIV Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan (18 – 20 Juli 2020)
 - b. Program Studi Pendidikan Profesi Ners, DIII Teknologi Elektro Medis, DIV Teknologi Elektro Medis, DIII Terapi Gigi, DIV Terapi Gigi (25 – 27 Juli 2020)
 - c. Program Studi DIII Keperawatan, DIV Keperawatan, DIII Sanitasi, DIV Sanitasi Lingkungan, DIII Gizi, DIV Gizi, DIII Teknologi Laboratorium Medis, DIV Teknologi Laboratorium Medis, DIII Teknik Gigi, DIII Rekam Medis, DIII Radiologi, DIII Optometri, DIII Fisioterapi, DIV Fisioterapi, DIII Keperawatan Anestesi, DIV Keperawatan Anestesi (8 – 10 Agustus 2020)
- Pelaksanaan UKNakes Periode II
 - a. Program Studi Pendidikan Profesi Ners, DIII Teknologi Elektro-medis, DIV Teknologi Elektro-medis, DIII Optometri, DIII Akupunktur, DIII Terapi Gigi, DIV Terapi Gigi, DIII Gizi, DIV Gizi (17 – 19 Oktober 2020)
 - b. Program Studi DIII Keperawatan, DIV Keperawatan, DIII Teknologi Laboratorium Medis, DIV Teknologi Laboratorium Medis, DIII Keperawatan Anestesiologi, DIV

Keperawatan Anestesiologi, DIII Ortetik Prostetik, DIV Ortetik Prostetik, DIII Teknik Gigi, DIII Radiologi, DIV Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (24 – 26 Oktober 2020)

- c. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, DIII Kebidanan, DIV Kebidanan, DIII Sanitasi, DIV Sanitasi Lingkungan, DIII Fisioterapi, DIV Fisioterapi, DIII Terapi Wicara, DIII Okupasi Terapi (7 – 9 November 2020)

Tabel 3.15 Jumlah Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi

No	Uji Kompetensi	Program Studi
1	Program Profesi Dokter	73
2	Program Profesi Dokter Gigi	28
3	Bidang Kesehatan	1.349
Total		1.450

Tabel 3.16 Jumlah Peserta Kompeten untuk Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter

Uji Kompetensi	Periode Pelaksanaan Uji					
	Periode I		Periode II		Periode III	
	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten
Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)	5.136	3.272	7.488	4.600	4.424	2.212

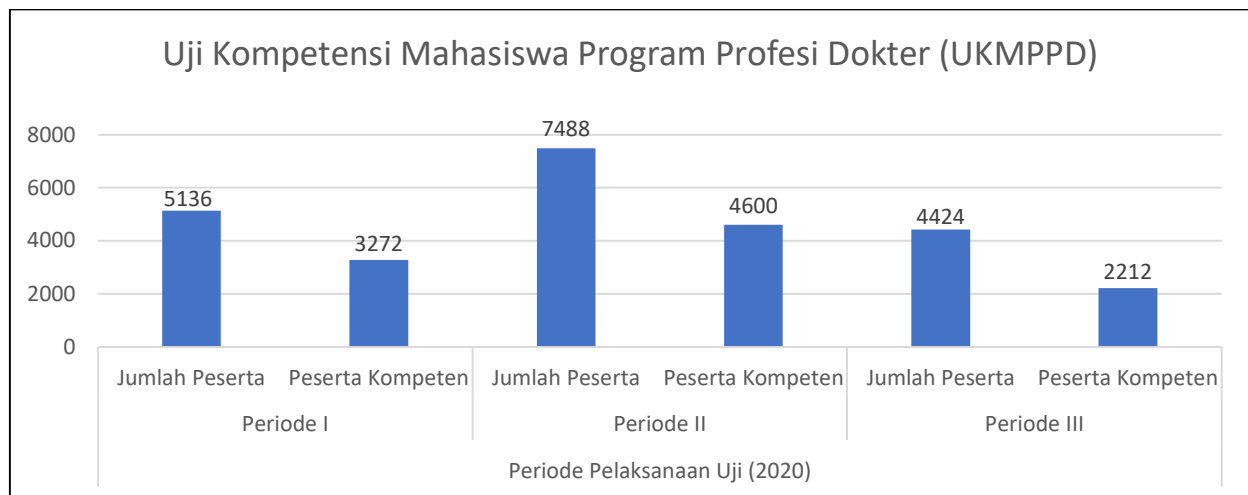
Tabel 3.17 Jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Peserta Kompeten untuk Uji Kompetensi Mahasiswa

Uji Kompetensi	Periode Pelaksanaan Uji							
	Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV	
	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten
Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter	1.001	782	1.181	975	735	733	578	423

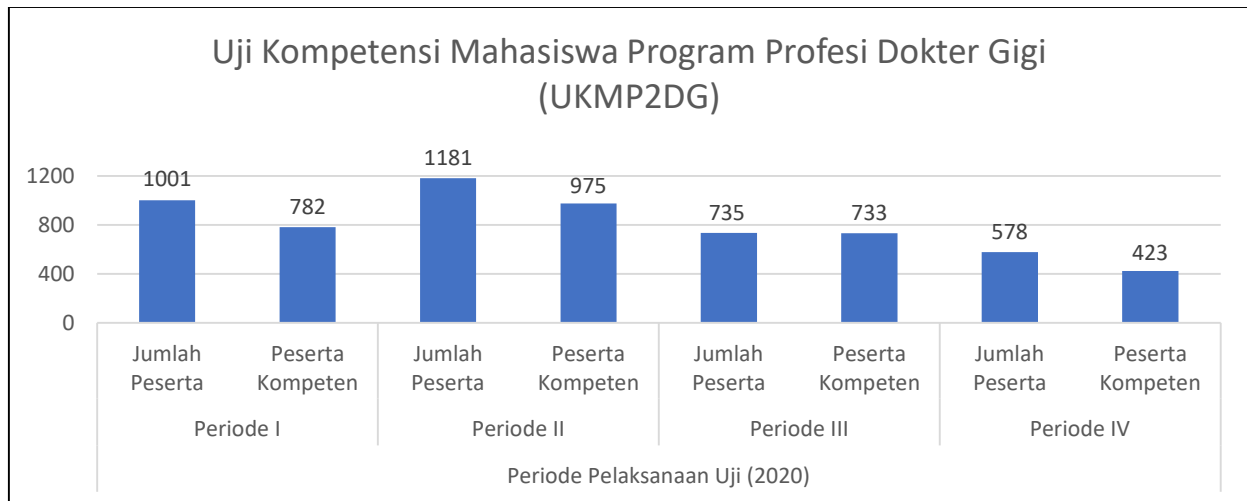
Gigi (UKMP2DG)								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.18 Jumlah Peserta Uji Kompetensi dan Peserta Kompeten untuk Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (UKNakes)

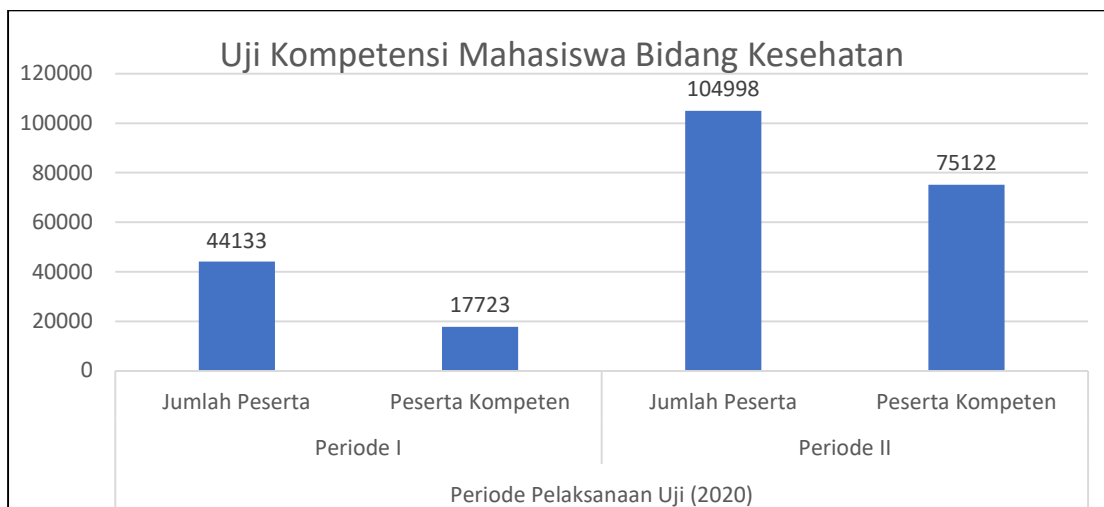
Uji Kompetensi	Periode Pelaksanaan Uji			
	Periode I		Periode II	
	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten	Jumlah Peserta	Peserta Kompeten
Bidang Kesehatan	44.133	17.723	104.998	75.122



Gambar 16. Diagram Perbandingan antara jumlah peserta yang ikut uji kompetensi dengan jumlah peserta yang kompeten per periode Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD)



Gambar 17. Diagram Perbandingan antara jumlah peserta yang ikut uji kompetensi dengan jumlah peserta yang kompeten per periode Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMP2DG)



Gambar 18. Diagram Perbandingan antara jumlah peserta yang ikut uji kompetensi dengan jumlah peserta yang kompeten per periode Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan (UKNakes)



Gambar 19. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan



Gambar 20. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter



Gambar 21. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi



Gambar 22. Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi di Malaysia

Kendala yang dihadapi:

- 1) Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebagian besar kota – kota di Indonesia mengakibatkan penundaan/perubahan jadwal penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagai contoh untuk program profesi dokter yang pada tahun lalu diselenggarakan dalam 4 periode, tahun ini hanya diselenggarakan dalam 3 periode, kemudian untuk bidang kesehatan hanya diselenggarakan dalam 2 periode;
- 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengakibatkan daya tampung tempat pelaksanaan uji kompetensi menjadi setengah dari daya tampung sebelum pandemi Covid-19;
- 3) Pelaksanaan Uji Kompetensi dimasa pandemi Covid-19 yang biasanya dilaksanakan di CBT Center masing – masing Program Studi dilaksanakan di Perguruan Tinggi terdekat dengan kota atau lokasi asal mahasiswa;
- 4) Proses Sosialisasi dengan Peserta dan Penyelia Pusat menggunakan daring sering terkendala jaringan terutama di Wilayah Indonesia Timur;
- 5) Mahasiswa Program Profesi Dokter dan Dokter Gigi yang berasal dari luar negeri (Malaysia) dilarang bepergian keluar dari negaranya

- 6) Uji Praktek/OSCE untuk Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Periode Agustus dan November 2020 tidak dilaksanakan secara nasional oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (PN-UKMPPD)

Alternatif mengatasi kendala:

- 1) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bersama Komite/Panitia Nasional Uji Kompetensi menyusun perubahan pedoman pelaksanaan uji Kompetensi selama masa covid-19 untuk pemenuhan standar pelaksanaan Uji Kompetensi
- 2) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi I – XIV melakukan verifikasi dan validasi tempat uji kompetensi baru untuk mendukung pelaksanaan uji kompetensi selama masa pandemi Covid-19 dengan mendekatkan dengan lokasi asal peserta uji kompetensi
- 3) Pelaksanaan Uji Praktek/OSCE untuk Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) Periode Agustus dan November 2020 tidak dilaksanakan di masing – masing Fakultas Kedokteran sesuai dengan kesepakatan Stakeholder terkait (AIPKI , IDI, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta Panitia Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (PN-UKMPPD)
- 4) Proses Briefing Penyelia Pusat, Peserta Uji Kompetensi dilaksanakan secara daring
- 5) Penunjukan Penyelia Pusat diutamakan yang dekat dengan lokasi asal Peserta Uji Kompetensi sehingga mobilisasi antar wilayah diminimalisir untuk mencegah penularan virus Covid – 19
- 6) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bekerja sama dengan Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur melakukan pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter Gigi (UKMP2DG) dilaksanakan di Universitas Putra Malaysia dan KBRI Kuala Lumpur.

Indikator Kinerja Kegiatan 6: Mahasiswa Mengikuti Transfer Kredit Internasional

Transfer kredit akademik adalah proses mengevaluasi komponen kualifikasi untuk menentukan keseluruhan / kesetaraan dengan kualifikasi lain dengan menyatukan kredit yang sebanding untuk pencapaian akademis dan prestasi individu. Transfer Kredit merupakan sebuah mekanisme pengakuan beban kerja dan prestasi pada suatu lembaga pendidikan tinggi dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengalihan dan Pemerolehan Kredit adalah pengakuan

Hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester atau ukuran lain untuk mencapai kompetensi pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Pengalihan Angka Kredit dan Pemerolehan Angka Kredit dapat dilakukan antar-prodi yang sama atau yang berbeda. Program Studi Peserta bebas menentukan mata kuliah yang akan dialihkreditkan pada Program Studi di Perguruan Tinggi Penerima.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Transfer Kredit Internasional sebagai bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan wawasan mahasiswa. Program Transfer Kredit

Internasional merupakan proses pengakuan terhadap beban studi dan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang telah diperoleh oleh seorang mahasiswa selama di perguruan tinggi mitra di luar negeri (*host university*). Disamping itu, melalui Program Transfer Kredit Internasional, perguruan tinggi asal (*home university*) di Indonesia dapat mengenal, mempelajari berbagai sistem transfer kredit yang ada seperti *European Transfer Credit System*, *ASEAN Credit Transfer System* maupun *UMAP Credit Transfer System*, serta kemudian menerapkan dan mengembangkan sistem transfer kredit yang sesuai dengan kebutuhan dan peraturan pendidikan tinggi di Indonesia.

Namun, seiring dengan tantangan pendidikan tinggi pada era Revolusi Industri 4.0 diperlukan inovasi penyelenggaraan program transfer kredit internasional dengan mengintegrasikan pembelajaran daring. Pada tahun 2020 terjadi pandemik COVID-19 yang mewabah keseluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga dengan adanya hal tersebut maka program transfer kredit internasional diselenggarakan secara *full online*/dalam jaringan.

Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Mobiltas dan integrasi perdagangan serta investasi di kawasan Asia dan dunia saat ini sangat cepat sehingga secara otomatis peningkatan mobilitas masyarakat antar negara juga semakin signifikan. Hal ini menyebabkan pendidikan tinggi memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang mampu menciptakan dan mempertahankan masyarakat global dan berbasis pengetahuan.

Istilah "internasionalisasi" telah lama populer dalam pendidikan tinggi. Dewasa ini perguruan tinggi terus bersaing untuk mencapai predikat tersebut. Begitupun kita telah familiar dengan istilah "universitas peringkat dunia", "pendidikan lintas batas" atau "pendidikan

transnasional". Mengingat peran signifikan pengetahuan dalam mengembangkan dan mempromosikan pertumbuhan di berbagai sektor, perluasan pendidikan tinggi penting untuk dilaksanakan (Varghese, 2008). Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah perguruan tinggi yang sangat besar di dunia harus bisa menyesuaikan diri dengan fenomena tersebut.

Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Permendikbud No 3 Tahun 2020 memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan minat dan cita-citanya. Kita meyakini, pembelajaran dapat terjadi di manapun, semesta belajar tak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium, tetapi juga di desa, industri, dan tempat-tempat kerja.

Oleh karena itu, transfer kredit merupakan salah satu program yang merupakan bagian dari Kebijakan Kampus Merdeka untuk memfasilitasi mahasiswa dalam upaya menambah dan menguatkan kompetensi melalui program studi lain atau perguruan tinggi lain. Untuk mempersiapkan mahasiswa dengan kompetensi global dan juga sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi derasnya persaingan global dalam berbagai aspek tersebut, perlu dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk transfer kredit internasional.

Tujuan

Melalui kesempatan berinteraksi dengan mahasiswa dan masyarakat luar negeri secara langsung, diharapkan mahasiswa akan mendapatkan nilai tambah melalui peningkatan harmonisasi antara *hard skill* dan *soft skill*, memperluas dan memperkuat jejaring, kerja sama, pemahaman sosio-kultur dan internasionalisasi sistem pendidikan tinggi Indonesia, serta pengembangan diri berkelanjutan (*Continuous self-Development*) bagi mahasiswa.

Secara kelembagaan, perubahan paradigma dalam kualitas, jaringan, dan inovasi pendidikan akan menjadi hasil dari pengalaman belajar dalam rangka pengembangan diri yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan nasional serta daya saing bangsa di level internasional dalam abad 21.

Indikator Kinerja Kegiatan, target dan realisasinya pada tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel 3.19 berikut.

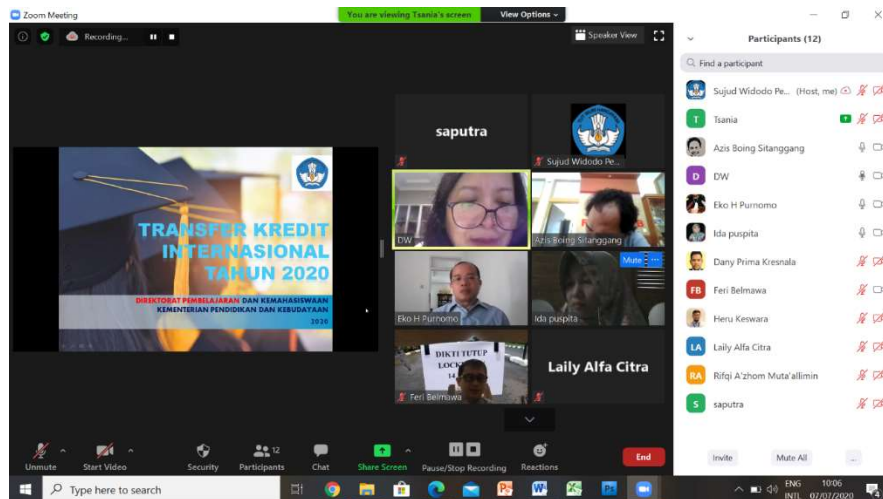
Tabel 3.19 Kinerja Mahasiswa Mengikuti Transfer Kredit Internasional

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Mahasiswa Mengikuti Transfer Kredit Internasional	Jumlah Mahasiswa Mengikuti Transfer Kredit Internasional	125	288	230.40%

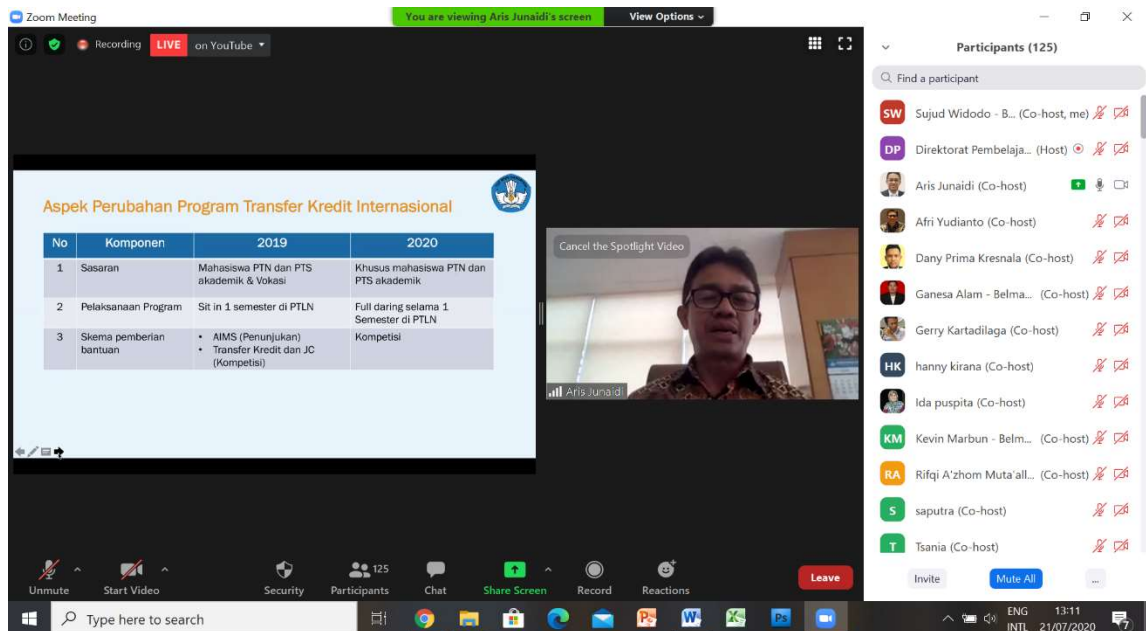
Peningkatan target disesuaikan dengan anggaran. Target awal 125 mahasiswa dengan menggunakan skema pertukaran secara luring, namun karena pandemi Covid-19 maka skema pertukaran dibuat *full* daring sehingga dengan anggaran yang tersedia dapat memfasilitasi jumlah mahasiswa yang lebih banyak.

Dalam mendukung ketercapaian target/realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKP) maka dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

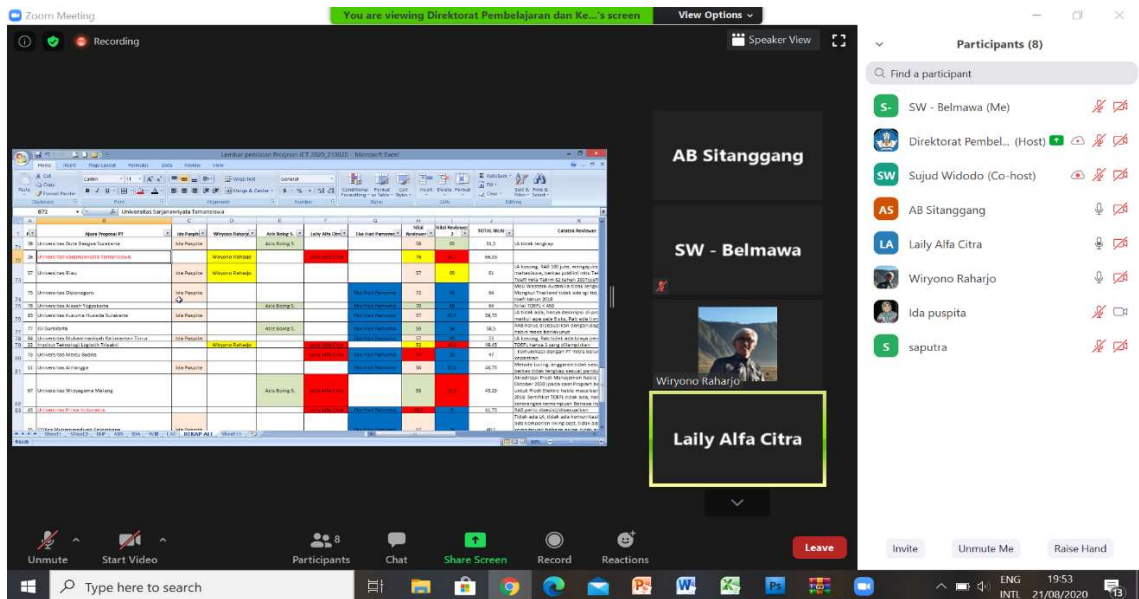
- 1) Rapat koordinasi terkait rencana kerja dan anggaran
- 2) Penyusunan panduan penyelenggaraan program transfer kredit internasional tahun 2020;
- 3) Sosialisasi program ke perguruan tinggi non vokasi;
- 4) Pendaftaran proposal pengajuan bantuan dana program transfer kredit internasional tahun 2020 dari perguruan tinggi;
- 5) Seleksi proposal pengajuan bantuan dana program transfer kredit internasional tahun 2020 dari perguruan tinggi;
- 6) Penetapan perguruan tinggi penerima bantuan dana program transfer kredit internasional tahun 2020; dan
- 7) Bimbingan Teknis pelaksanaan program kepada perguruan tinggi penerima bantuan dana transfer kredit internasional tahun 2020
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program transfer kredit internasional tahun 2020.



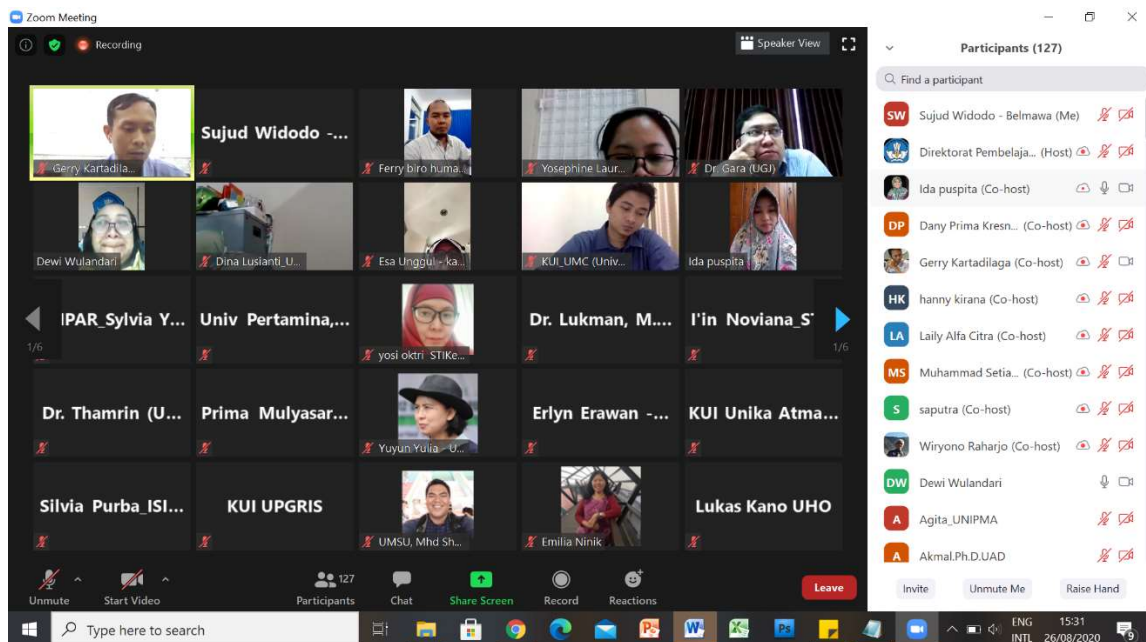
Gambar 23. Rapat Penyusunan Panduan Program Transfer Kredit Internasional



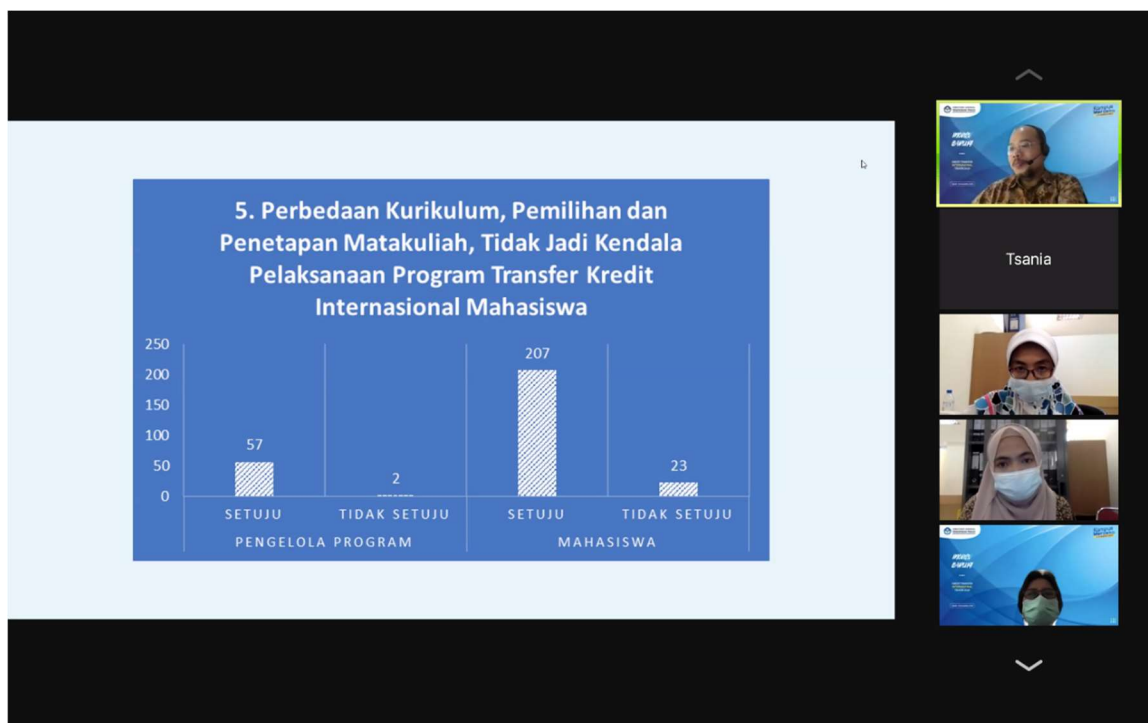
Gambar 24. Sosialisasi Program Transfer Kredit Internasional secara daring



Gambar 25. Seleksi Proposal Pengajuan Bantuan Dana Program Transfer Kredit Internasional Tahun 2020



Gambar 26. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Kepada Perguruan Tinggi Penerima Bantuan Dana Transfer Kredit Internasional Tahun 2020



Gambar 27. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Transfer Kredit Internasional Tahun 2020

Tabel 3.20 Jadwal Pelaksanaan Program Transfer Kredit Internasional

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman bantuan dana Program Transfer Kredit (melalui laman dikti.kemdikbud.go.id)	20 Juli 2020
2.	Sosialisasi program ke perguruan tinggi	21 - 25 Juli 2020
3.	Penerimaan proposal	21 Juli - 7 Agustus 2020
4.	Seleksi proposal	10 – 14 Agustus 2020
5.	Pengumuman penerima bantuan program	19 Agustus 2020
6.	Bimbingan teknis dan penandatanganan kontrak pelaksanaan program kepada perguruan tinggi penyelenggara	24 Agustus 2020
7.	Pelaksanaan Program	25 Agustus – 31 Desember 2020
8.	Penyerahan laporan kemajuan	30 November 2020
9.	Monitoring dan evaluasi	
10.	Penyerahan laporan akhir	31 Desember 2020

Kendala yang dihadapi:

- 1) Kepastian rencana program dan anggaran Kementerian yang mundur, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program ikut tertunda.
- 2) Dikarenakan pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan mobilitas mahasiswa secara luring.
- 3) Koordinasi dengan perguruan tinggi penerima bantuan dana terhambat terkait penandatanganan dokumen kerja sama, karena tidak memungkinkan untuk pertemuan tatap muka.

Alternatif mengatasi kendala:

- 1) Mengubah skema dan model pertukaran yang semula mobilitas mahasiswa dilaksanakan secara luring/sit in di perguruan tinggi mitra menjadi dilaksanakan dengan full daring melalui LMS atau sistem pembelajaran daring perguruan tinggi mitra.
- 2) Koordinasi dengan perguruan tinggi penerima bantuan dana dilaksanakan secara daring adapun terkait penandatanganan dokumen kerja sama dikarenakan pandemi Covid-19 maka dokumen dikirimkan oleh perguruan tinggi melalui pos.

Saran pengembangan (rekomendasi)

Rencana dan anggaran program yang sudah pasti akan mempercepat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Indikator Kinerja Kegiatan 7: Mahasiswa Menjalankan Wirausaha

Mahasiswa menjadi bagian dari sumber daya manusia yang dapat menjadi tulang punggung pembangunan melalui kemandirian ekonomi bangsa. Mahasiswa juga merupakan bagian dari generasi millennial Indonesia. Berdasarkan panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2020 (Kemendikbud, 2020) yang mengutip riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% millennial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Minat dan potensi wirausaha generasi milenial yang besar ini perlu didukung dan difasilitasi melalui tata kelola pendidikan tinggi yang mendukung program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi.

Pentingnya program mahasiswa berwirausaha di perguruan tinggi telah disadari oleh pemerintah dan diwujudkan melalui Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Perlu program dan aksi lebih lanjut agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Sebagai bagian dari upaya implementasi kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dalam wirausaha mahasiswa, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melaksanakan Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020 yang merupakan bagian dari program

Kemdikbud untuk memperkuat ekonomi nasional dan mendukung percepatan ekonomi digital menuju revolusi industri 4.0.

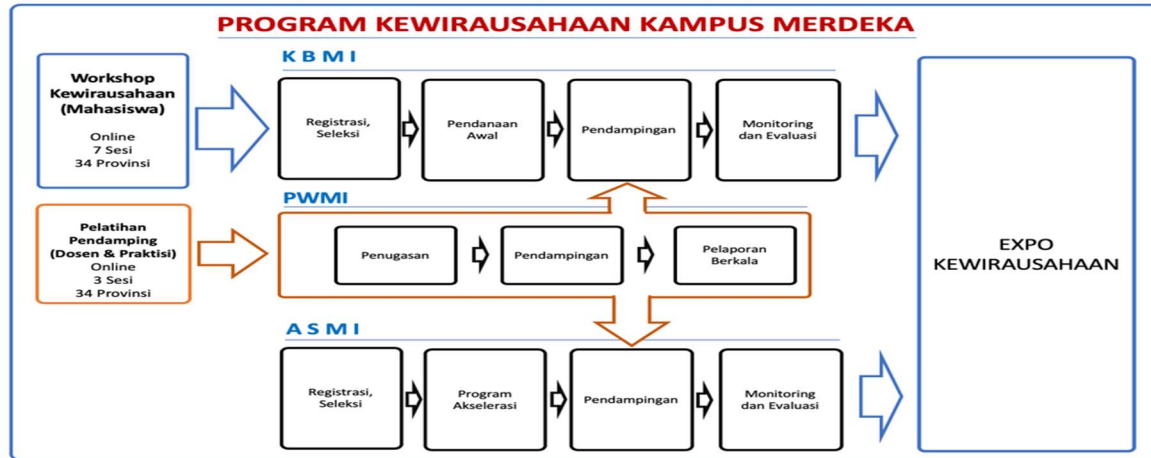
Program Kewirausahaan Kampus Merdeka tahun 2020 didesain berdasarkan *framework* dari proses program wirausaha Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi kewirausahaan, menyusun proposal wirausaha, menjalankan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan dan dievaluasi di akhir program. Proses pembelajaran berwirausaha ini diharapkan dapat menjadi *blended learning* kewirausahaan yang dapat dikonversi dalam satuan SKS pembelajaran di perguruan tinggi.

Kegiatan pertama dalam Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020 adalah Workshop Kewirausahaan yang diadakan 7 sesi dan bertujuan untuk peningkatan kapasitas berwirausaha mahasiswa Indonesia dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Selanjutnya kegiatan kedua adalah pelaksanaan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia yang menekankan pada pendanaan pengembangan bisnis mahasiswa dan Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia yang memberikan skema akselerasi bagi mahasiswa yang memiliki bisnis startup digital. Kedua kegiatan ini berjalan simultan dan berbarengan.

Guna terwujudnya tujuan dari Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020, maka dalam prosesnya diberikan pula pendampingan melekat oleh praktisi / pengusaha sebagai mentor dan dosen pendamping yang memposisikan diri sebagai *coach* bisnis yang berjalan melalui Program Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Indonesia (PWMI). Diharapkan semua progres dilaporkan secara berkala dengan form bimbingan bagi mentor. Sebagai puncak dari kegiatan Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020 dilaksanakan *Startup Summit* dan Pameran atau Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia 2020.

Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020 adalah kesatuan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing dan sekaligus menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Program-program yang saling bersinergi seperti pada Gambar 1. Kerangka Program Kewirausahaan Kampus Merdeka berikut:



Gambar 28. Kerangka Program Kewirausahaan Kampus Merdeka 2020

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 4) Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.

Indikator Kinerja Kegiatan, target dan realisasinya pada tahun 2020 dapat digambarkan pada table 3.21 berikut.

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Mahasiswa Menjalankan Wirausaha

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Mahasiswa Menjalankan Wirausaha	Jumlah Mahasiswa Menjalankan Wirausaha	3.000	3.256	109%

1. Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI)

Dalam rangka mendorong munculnya calon pengusaha muda di perguruan tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbud kembali melaksanakan Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia tahun 2020 sebagai keberlanjutan dari Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia (KBMI) yang telah diselenggarakan di tahun-tahun sebelumnya. KBMI diharapkan mampu mendukung visi-misi pemerintah yang tertuang dalam Renstra Kemendikbud untuk pengembangan wirausaha baru dalam mewujudkan kemandirian bangsa melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Program KBMI

diharapkan juga dapat menghasilkan karya kreatif, yang inovatif dalam membuka peluang bisnis yang berguna bagi mahasiswa setelah menyelesaikan studi.

Program KBMI yang dimulai sejak tahun 2017 dinilai telah memberikan dampak positif pada mahasiswa untuk mendorong mahasiswa berwirausaha, termasuk model pengembangan usaha yang dimiliki oleh mahasiswa. Pelaksanaan KBMI akan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka memberikan motivasi berwirausaha dan pengembangan usaha di kalangan mahasiswa dengan harapan dapat diadopsi menjadi sebuah sistem pembinaan berwirausaha di perguruan tinggi.

Program KBMI menitikberatkan pada orientasi pada pengembangan, proses, dan hasil usaha (profit). Tahapan KBMI tahun 2020 meliputi pengusulan proposal, pelatihan rencana usaha, penetapan penerima hibah KBMI, pendampingan wirausaha, monitoring evaluasi serta Pameran/Ekspo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia sebagai puncak rangkaian kegiatan KBMI.

Tujuan Program KBMI adalah:

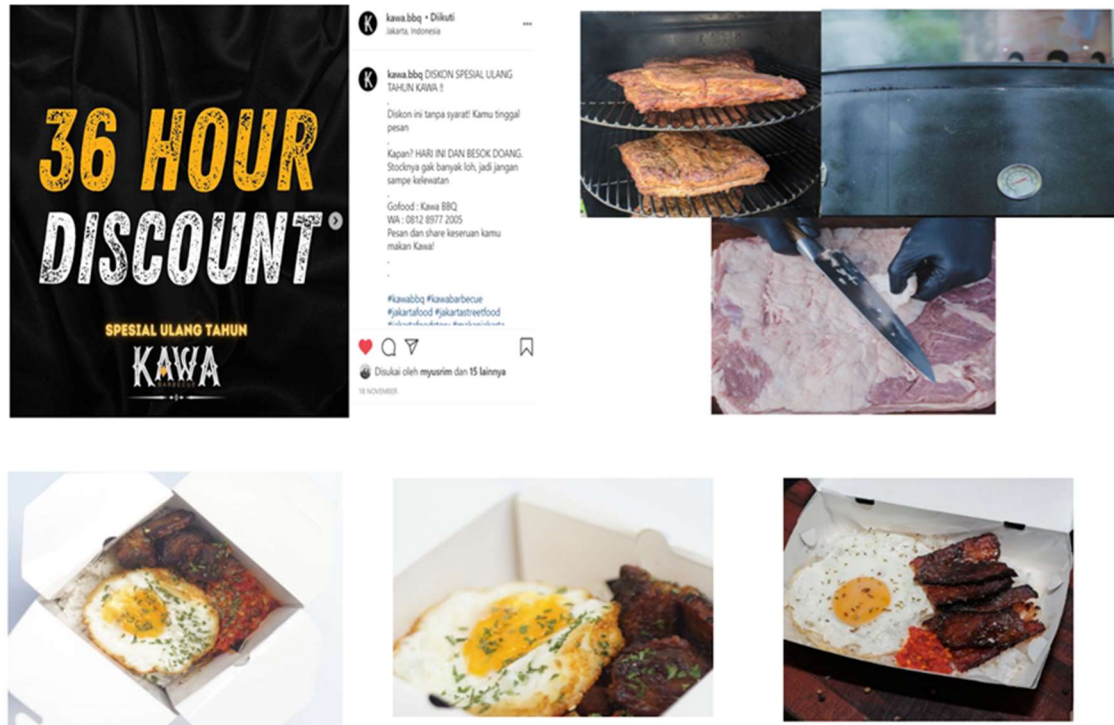
- 1) Menumbuhkan karakter wirausaha mahasiswa;
- 2) Menumbuhkembangkan wirausaha baru kreatif yang inovatif berbasis Iptek;
- 3) Membantu mahasiswa dalam menentukan keunikan bisnis berbasis teknologi dengan menemukan celah pasar yang tepat untuk meningkatkan peluang keberhasilan bisnis.

Ruang Lingkup

Program KBMI menitikberatkan pada orientasi pada pengembangan, proses, dan hasil usaha (profit). Ruang lingkup KBMI tahun 2020 meliputi pengusulan proposal, penetapan penerima hibah KBMI, pendampingan wirausaha, serta monitoring dan evaluasi. Luaran dari kegiatan KBMI 2020 adalah antara lain 1) omset usaha semakin membesar, 2) market bisnis mahasiswa terus berkembang dan 3) berpotensi mendapatkan permodalan lain.

Bentuk kegiatan KBMI meliputi:

- 1) Pemberian bantuan untuk pengembangan bisnis dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan senilai Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000,- untuk setiap kelompok bisnis yang lolos seleksi;
- 2) Pendampingan Bisnis Mahasiswa;



Gambar 29. Produk Mahasiswa Program KBMI

2. Akselerasi Start Up Mahasiswa Indonesia (ASMI)

Sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah menargetkan lebih dari seribu "startup" baru yang diharapkan dapat bermunculan dan diantaranya lahir dari kampus-kampus di seluruh Indonesia. Banyak perguruan tinggi telah mengembangkan inkubator bisnis untuk membina kewirausahaan mahasiswa sekaligus mendukung startup mahasiswa yang memiliki ide-ide dan gagasan besar terutama dengan memanfaatkan teknologi saat ini. Startup akan lebih mudah berkembang di kampus-kampus yang memiliki kemampuan dan infrastruktur teknologi informasi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan tren bisnis digital di masa depan dimana startup dapat menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi nasional.

Mahasiswa Indonesia terus didorong untuk mengembangkan bisnis digital. Pengembangan startup di Indonesia menjadi salah satu program prioritas dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud pada tahun 2020. Program Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia diharapkan dapat mengakselerasi startup mahasiswa Indonesia terbaik untuk berkembang menjadi startup global. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan meliputi kegiatan workshop, pendampingan dan *Student Startup Accelerator Camp (SSAC)*.

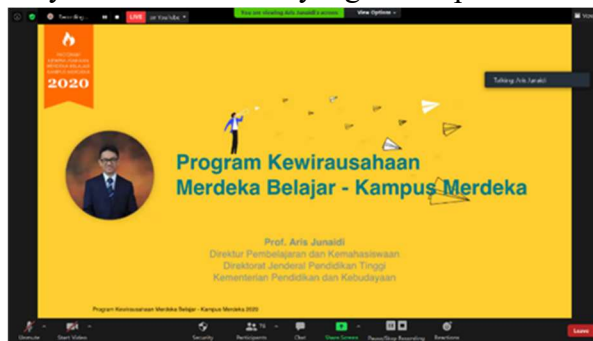
Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan perusahaan digital teknologi dan pusat-pusat inkubator bisnis terpilih di dalam negeri. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa aktif dari perguruan tinggi tingkat sarjana (program akademik) di Indonesia yang telah memiliki startup yang berjalan selama minimal 1 (satu) tahun.

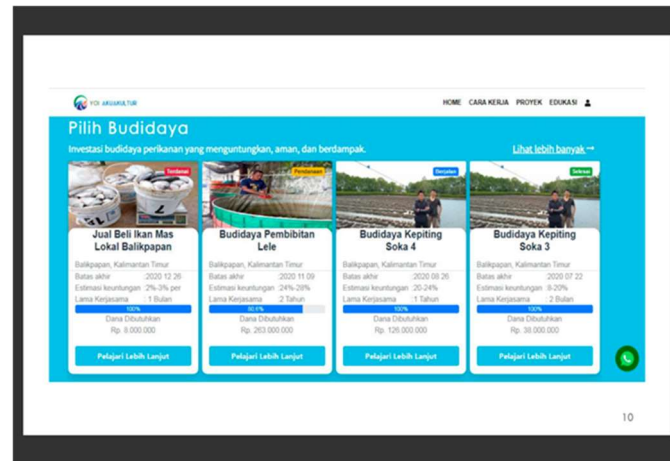
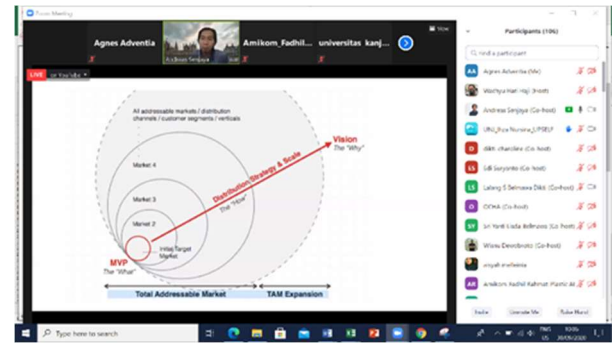
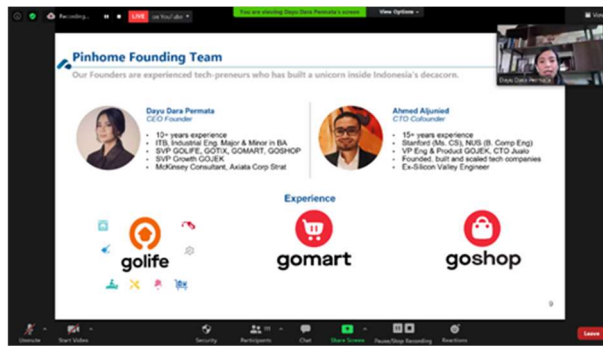
Tujuan Program ASMI adalah:

- 1) Meningkatkan motivasi kewirausahaan dan membangun ekosistem startup di Indonesia di kalangan mahasiswa;
- 2) Mengakselerasi startup mahasiswa Indonesia menjadi startup global;
- 3) Membangun network startup mahasiswa Indonesia.

Bentuk Kegiatan

Program akselerasi startup mahasiswa diikuti 100 startup mahasiswa Indonesia yang lolos seleksi untuk mengikuti workshop akselerasi. Dalam rangkaian workshop tersebut, selanjutnya dari 100 startup mahasiswa yang mengikuti workshop dipilih startup mahasiswa Indonesia terbaik yang mendapatkan dana bantuan pengembangan startup maksimal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dana bantuan digunakan untuk mempercepat pengembangan bisnis dan menyelesaikan kendala yang dihadapi.





Gambar 30. Startup Mahasiswa Program ASMI

3. Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Indonesia (PWMI)

Keberhasilan sebuah bisnis, tidak hanya ditentukan oleh pemilik bisnis itu sendiri, namun ditentukan pula oleh peran seorang pendamping atau mentor. Seorang pendamping dalam program Kewirausahaan Merdeka terdiri maksimal 2 orang yaitu pendamping dari kalangan dosen yang ditunjuk dan atau pendamping dari kalangan industri / pengusaha.

Diketahui bahwa bisnis memiliki perjalanan yang dinamis dimana sebuah bisnis bisa menghasilkan keuntungan maupun kerugian. Memiliki pendamping yang sudah berpengalaman menjalankan bisnis akan mahasiswa untuk menganalisis masalah yang dihadapi serta memberikan saran untuk solusi. Dengan demikian mahasiswa dapat mempersiapkan tindakan pencegahan sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian.

Begitu pula saat bisnis mahasiswa mengalami kejenuhan atau keterpurukan, maka seorang pendamping akan memotivasi untuk kembali bersemangat. Kegagalan atau kerugian merupakan bagian dari proses bisnis yang harus dihadapi dan merupakan bahan pembelajaran seorang pengusaha yang harus terus diasah agar terus menjadi ahli dan berkembang.

Tujuan PWMI

Program pendampingan melekat ini bertujuan agar bisnis mahasiswa dapat terus terpantau perkembangan bisnisnya mulai dari saat diterimanya hibah, proses monitoring, hingga KMI Expo. Selain itu mahasiswa juga akan mendapatkan pengalaman dan pandangan terhadap bisnisnya, terbantu dalam pengambilan keputusan serta ada tempat bertanya tentang segala hal yang berkaitan dengan bisnisnya. Pendamping yang akan mendampingi terdiri dari dosen yang ditugaskan sebagai pendamping atau bisa juga pengusaha mempunyai latar belakang bisnis yang serupa dengan bisnis yang dijalankan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/ pengusaha yang telah berhasil.

Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah:

- 1) Menyiapkan dosen dan wirausaha untuk menjadi pendamping kewirausahaan mahasiswa;
- 2) Pelatihan dan Persamaan Persepsi model pendampingan wirausaha mahasiswa;
- 3) Penetapan dan Publikasi Pendamping Wirausaha Mahasiswa Indonesia 2020;
- 4) Pelaksanaan pendampingan wirausaha mahasiswa Indonesia yang lolos program Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI) 2020 dan Akselerasi Startup Bisnis Mahasiswa Indonesia (ASMI) 2020;
- 5) Pelaporan kegiatan pendampingan.

Luaran Program PWMI

Kemendikbud mempunyai pendamping bisnis mahasiswa yang sudah diberikan pembekalan dan mahasiswa mempunyai pendamping bisnis yang akan mampu memberikan pengalaman dan pandangan terhadap bisnis mahasiswa, sehingga mahasiswa terbantu dalam pengambilan keputusan bisnis hal-hal yang berkaitan dengan bisnisnya. Memberikan tips cara berbisnis secara praktis, pendidikan kewirausahaan terapan dan juga akses jejaring bisnis yang dapat mendukung perkembangan bisnisnya.

4. Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI)

Roda perekonomian Indonesia membutuhkan banyak profesi wirausaha untuk dapat berjalan dengan baik. Seiring dengan revolusi industri 4.0 penting bagi kaum millennial khususnya mahasiswa Indonesia untuk membangun karakter kewirausahaan yang merupakan salah satu solusi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, seorang wirausahawan dikenal sebagai seseorang bisa menyesuaikan kondisi apapun, peka terhadap lingkungan, membuat produk atau jasa sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Khususnya di masa pandemi saat sekarang ini, diperlukan banyak generasi muda yang mempunyai pola pikir dan jiwa wirausaha agar Indonesia dapat tidak hanya bertahan, namun bertumbuh di kondisi yang kurang baik sekalipun.

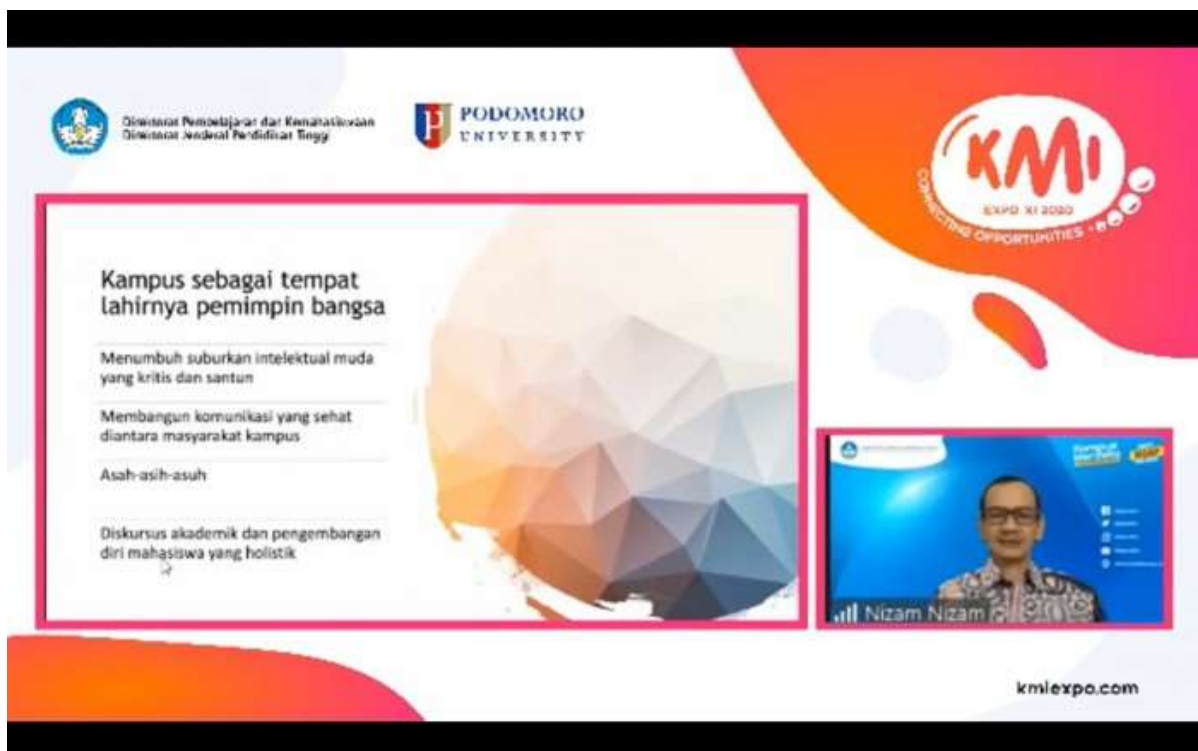
Dalam menumbuhkan jiwa dan kemampuan kewirausahaan mahasiswa Indonesia, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Pembelajaran dan Kemahasiswaan), Direktorat

Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan berbagai Program Kampus Merdeka. Melalui semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Program Kewirausahaan terdiri atas Workshop Kewirausahaan, Kegiatan Bisnis Manajemen Mahasiswa Indonesia (KBMI), Akselerasi StartUp Mahasiswa Indonesia (ASMI), serta pendampingan Melekat oleh Praktisi/Pengusaha dan dosen melalui Pendampingan Wirausaha Mahasiswa Indonesia (PWMI).

Mahasiswa dalam melaksanakan KBMI dan ASMI tahun 2020 terus didampingi praktisi dan dosen dengan harapan memiliki usaha semakin kuat dan bertumbuh yang kemudian dilanjutkan untuk mengikuti ajang Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia (KMI) Expo sebagai puncaknya. KMI Expo adalah tempat bertemunya mahasiswa Indonesia yang telah dibekali pengetahuan untuk menampilkan kreativitas mahasiswa dan membangun jaringan bisnis.

Tujuan Expo KMI

- 1) Menjadi wadah pengembangan kreativitas wirausaha mahasiswa sebagai entrepreneur muda.
- 2) Menjadi fasilitas promosi produk kreatif – inovatif kewirausahaan mahasiswa.
- 3) Memotivasi mahasiswa Indonesia menjadi entrepreneur yang kompeten, unggul serta mampu untuk bersaing baik secara lokal maupun global.



Gambar 31. Pembukaan Expo KMI oleh Dirjen Dikti

Tabel 3.22 Capaian IKK Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha

JUMLAH MAHASISWA BERWIRAUSAHA											
Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
Target	realisasi	Target	realisasi	Target	realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2000	2800	2500	2553	3000	4470	3500	3682	4000	4145	3.000	3.256

Pada tahun 2020 capaian indikator kinerja “Jumlah Mahasiswa Berwirausaha” ditargetkan sebesar 3.000 mahasiswa, sampai triwulan 4 terealisasi sebesar 3.256 mahasiswa. Beberapa faktor yang mendorong tercapainya target mahasiswa mulai berwirausaha antara lain:

- 1) Sosialisasi bisa dilakukan secara daring melalui media zoom dan youtube sehingga mahasiswa yang terlibat semakin banyak dan massif
- 2) Perencanaan program yang tepat sasaran
- 3) komunikasi yang baik dengan perguruan tinggi, kerja sama tim kewirausahaan yang baik.

Indikator Kinerja Program “Jumlah Mahasiswa Berwirausaha” ditargetkan sebesar 3.000 mahasiswa. Jumlah itu tentu saja masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah mahasiswa secara nasional. Hal yang penting adalah upaya untuk menyiapkan lulusan perguruan tinggi yang berjiwa wirausaha harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan massif.

Kendala yang dihadapi:

- 1) Pelaksanaan program pada saat pandemi Korona sehingga perlu penyesuaian pelaksanaan program mulai dari koordinasi, sosialisasi, workshop, hingga pelaksanaan program.
- 2) Program kewirausahaan dilaksanakan pada saat pertengahan tahun yang mana mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan di perguruan tinggi
- 3) Komitmen dan dukungan perguruan tinggi untuk kegiatan kewirausahaan yang masih beragam.
- 4) Belum semua perguruan tinggi memiliki unit kewirausahaan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan program kewirausahaan, termasuk melakukan sosialisasi program kewirausahaan kepada mahasiswa.
- 5) Belum terlaksananya pelatihan dan pembimbingan secara berkelanjutan
- 6) Infrastruktur untuk mengembangkan dan memasarkan produk/jasa wirausaha.

Alternatif Mengatasi Kendala:

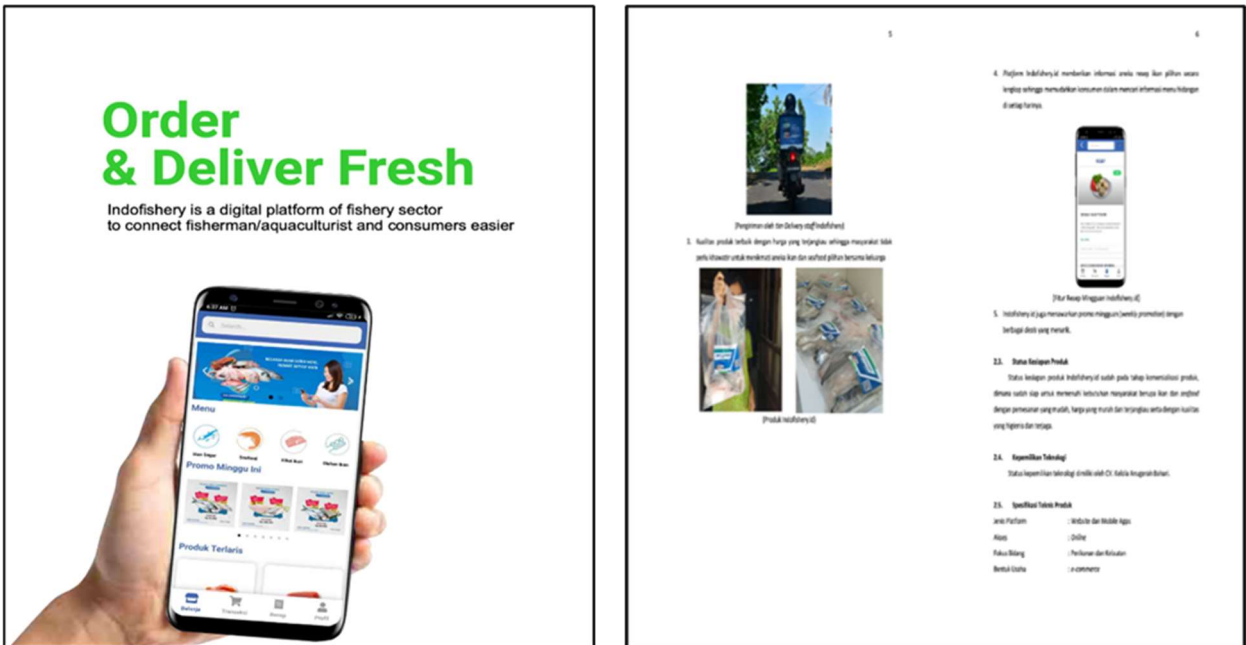
- 1) Sosialisasi dan promosi sukses berwirausaha melalui sekolah, perguruan tinggi, media massa.
- 2) Sosialisasi terhadap pengelola kewirausahaan di perguruan tinggi lebih difokuskan.
- 3) Mendorong setiap perguruan tinggi untuk memiliki unit pengelola kewirausahaan kampus.
- 4) Pelatihan dan pembimbingan berwirausaha secara berkelanjutan
- 5) Pengembangan infrastruktur yang menunjang wirausahaan

Saran Pengembangan (Rekomendasi):

Perguruan tinggi wajib memiliki pengelola khusus kewirausahaan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk menstimulasi pembinaan kewirausahaan.



8



Gambar 32. Produk Hasil Wirausaha Mahasiswa

Indikator Kinerja Kegiatan 8: Instrumen Kompetensi Lulusan

Dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki standar kompetensi lulusan yang berdaya saing unggul. Maka Pemerintah menerbitkan aturan yang mengamanatkan uji kompetensi, yang mengatur:

- 1) Mahasiswa bidang kesehatan, Pendidikan kedokteran, dan Pendidikan Profesi Guru pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- 2) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- 3) Uji Kompetensi ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- 4) Standar kompetensi kerja disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing dan ditetapkan oleh Menteri.
- 5) Mahasiswa pendidikan vokasi yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
- 6) Mahasiswa pendidikan profesi yang lulus Uji Kompetensi memperoleh Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.

Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang Kesehatan, Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Profesi Guru. Maka perlu dilakukan peta kegiatan di kompetensi lulusan untuk pelaksanaan uji kompetensi di Tahun 2020.

Oleh karena itu pentingnya peningkatan mutu implementasi uji kompetensi nasional. Penguatan mutu standar uji kompetensi (soal, sumber daya manusia, sarana/prasarana dan sistem kelembagaan panitia) secara berkesinambungan. Penguatan kerja sama dengan berbagai stakeholders pendidikan tinggi dalam upaya meningkatkan mutu sistem uji kompetensi nasional, dan untuk mendapatkan rekognisi internasional. Penguatan manajemen data uji kompetensi nasional sehingga dapat digunakan oleh pemerintah dan berbagai stakeholders untuk dasar kebijakan penjaminan mutu pendidikan dan pelayanan masyarakat pendidikan.

Penjaminan mutu (*quality assurance*) dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan memenuhi standar mutu dan pelaksanaannya dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga produk yang dihasilkan memenuhi keinginan stakeholders. Dengan penjaminan mutu dapat dipastikan bahwa mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Jadi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam meningkatkan mutu lulusan mengupayakan pemenuhan standar dalam pelaksanaan uji kompetensi, salah satunya adalah melakukan koordinasi mulai dari penyiapan soal (item development, item review, expert review, hingga pemaketan soal), penyiapan data peserta sesuai dengan PD-Dikti, menyiapkan infrastruktur pendukung pelaksanaan uji kompetensi (Standarisasi tempat uji kompetensi, workshop pengelola tempat uji kompetensi) yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan.

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan:

- 1) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
- 3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 4) UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
- 5) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kesehatan
- 6) UU Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keperawatan
- 7) UU No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
- 8) Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9) Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI
- 10) Permendikbud No. 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
- 11) Permendikbud No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan, target dan realisasinya pada tahun 2020 dapat digambarkan pada table 3.23 berikut.

Tabel 3.23 Indikator Kinerja Instrumen Kompetensi Lulusan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Instrumen Kompetensi Lulusan Tracer Study	Jumlah Instrumen Kompetensi Lulusan	12	28	233,3%

Pelaksanaan Kegiatan Instrumen Kompetensi Lulusan berjalan lancar yang dilaksanakan dalam 8 batch periode untuk bidang kesehatan, untuk program profesi dokter, dokter gigi dan dokter hewan dilaksanakan melalui proses hibah ke perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai bendahara pelaksana uji kompetensi dalam hal ini adalah Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Kegiatan Instrumen Kompetensi Lulusan sebanyak dua belas (28) bidang ilmu dengan persentasi capaian sebesar 233,3%.

Terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan Instrumen Kompetensi Lulusan dikarenakan adanya Pandemi Covid – 19 pembahasan sosial skala besar dilaksanakan sepanjang tahun 2020 sehingga sehingga proses *item development* soal dan *item review* soal yang biasanya mengumpulkan peserta yang terdiri atas dosen yang ditugaskan oleh perguruan tinggi sesuai dengan bidang ilmu yang dilakukan secara luring (tatap muka langsung) tidak dapat dilakukan sehingga untuk mengatasi kendala tersebut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan bekerjasama dengan Komite Nasional Uji Kompetensi/Panitia Nasional Uji Kompetensi dilakukan upaya berkoordinasi dengan para Item Bank Administrator masing – masing bidang ilmu untuk menyiapkan mekanisme pelaksanaan *item development* soal dan *item review* soal dilaksanakan secara daring.

Uraian Kegiatan-kegiatan Kegiatan Instrumen Kompetensi Lulusan

Bidang Profesi Dokter Gigi:

Pelatihan Penulisan dan Penelaahan Soal Uji Teori dan Praktik

Tanggal Pelaksanaan: 1 September – 11 November 2020 bidang ilmu yang dilatih (Bedah Mulut, Ilmu Penyakit Mulut, Periodonsia, Orthodonsia, Konservasi Gigi, IKGA, IKGM, Radiologi KG, Biomaterial KG, Biologi Oral) di ikuti oleh 32 Prodi Kedokteran Gigi

Pelatihan Kordinator IBA Lokal 8 Oktober 2020 yang diikuti oleh 32 Prodi Kedokteran Gigi

Bidang Profesi Dokter:

Pelatihan Penulisan Soal MCQ, Penulisan Soal MCQ, Review Soal MCQ, Pelatihan Soal OSCE, Penulisan Soal OSCE, Review Soal OSCE, Pelatihan Psikometrik soal MCQ dan OSCE bidang ilmu yang dilatih (Muskuloskeletal, THT, Respirasi, Reproduksi, Kardiovaskuler, Saraf, Integumen, Psikiatri, Gastroenterologi, IKM, Forensik, Ginjal dan Saluran Kemih, Mata, Muskuloskeletal, Hematologi)

Tanggal Pelaksanaan : 19 September – 24 November 2020

Bidang Kesehatan:

Pengembangan Item Development dan Item Review Soal dilaksanakan dalam 8 batch yang diikuti oleh 10 bidang kesehatan (Keperawatan dan Profesi Ners, Kebidanan dan Profesi Bidan, Teknik Laboratorium Medik, Terapi, Kesehatan, dan Teknik Gigi, Elektromedik, Rekam medis dan Informasi Kesehatan, Sanitasi, Akupunktur, Fisioterapi, Gizi)

Tanggal Pelaksanaan : 2 September – 12 Desember 2020

Tabel 3.24 Jumlah bidang ilmu pada Kegiatan Instrumen Kompetensi Lulusan

No	Program Studi	Bidang ilmu
1	Program Profesi Dokter	1
2	Program Profesi Dokter Gigi	1
3	Bidang Kesehatan: DIII Keperawatan, DIV Keperawatan, Profesi Ners, DIII Kebidanan, DIV Kebidanan, Profesi Bidan, DIII Teknik Laboratorium Medik, DIV Teknik Laboratorium Medik, DIII Terapi Gigi, DIV Terapi Gigi, DIII Sanitasi, DIV Sanitasi Lingkungan, DIII Gizi, DIV Gizi, DIII Elektromedik, DIV Teknologi Rekasaya Elektromedik, DIII Teknik Gigi, DIII Terapi Wicara, DIII Terapi Okupasi, DIII Radiologi, DIV Radiologi, DIII Akupunktur, DIII Fisioterapi, DIV Fisioterapi, DIII Ortetik Prostetik, DIV Ortetik Prostetik	26
Total		28

Tabel 3.25 Jumlah Soal yang dihasilkan (*item development*) dan Jumlah soal yang di review (*item review*) pada Program Studi Program Profesi Dokter

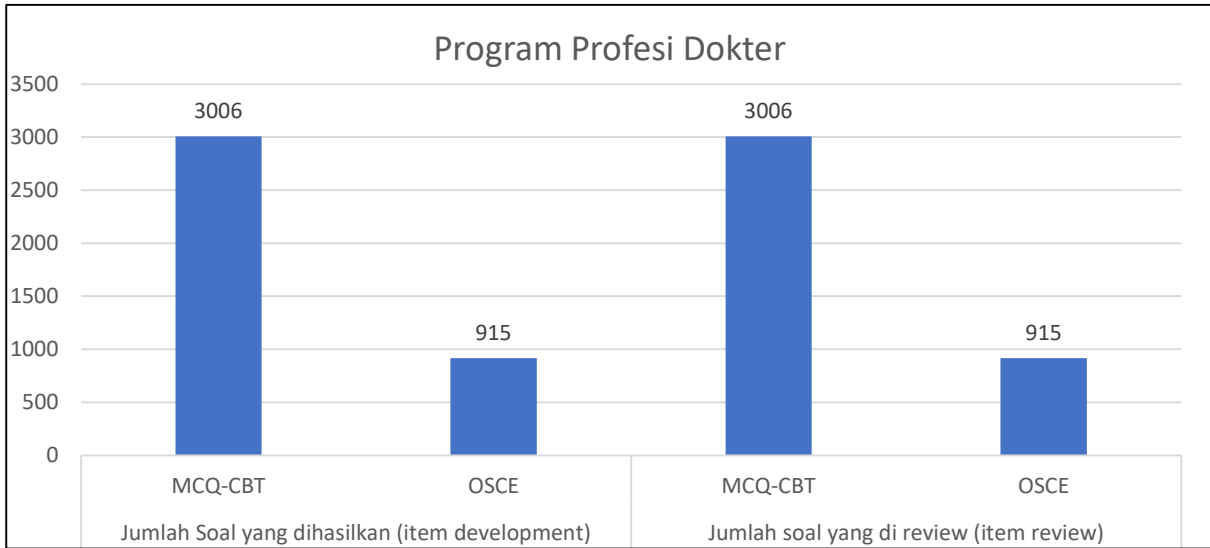
Bidang Ilmu	Jumlah Soal yang dihasilkan (<i>item development</i>)		Jumlah soal yang di review (<i>item review</i>)	
	MCQ-CBT	OSCE	MCQ-CBT	OSCE
Program Profesi Dokter	3006	915	3006	915

Tabel 3.26 Jumlah Soal yang dihasilkan (*item development*) dan Jumlah soal yang di review (*item review*) pada Program Studi Program Profesi Dokter Gigi

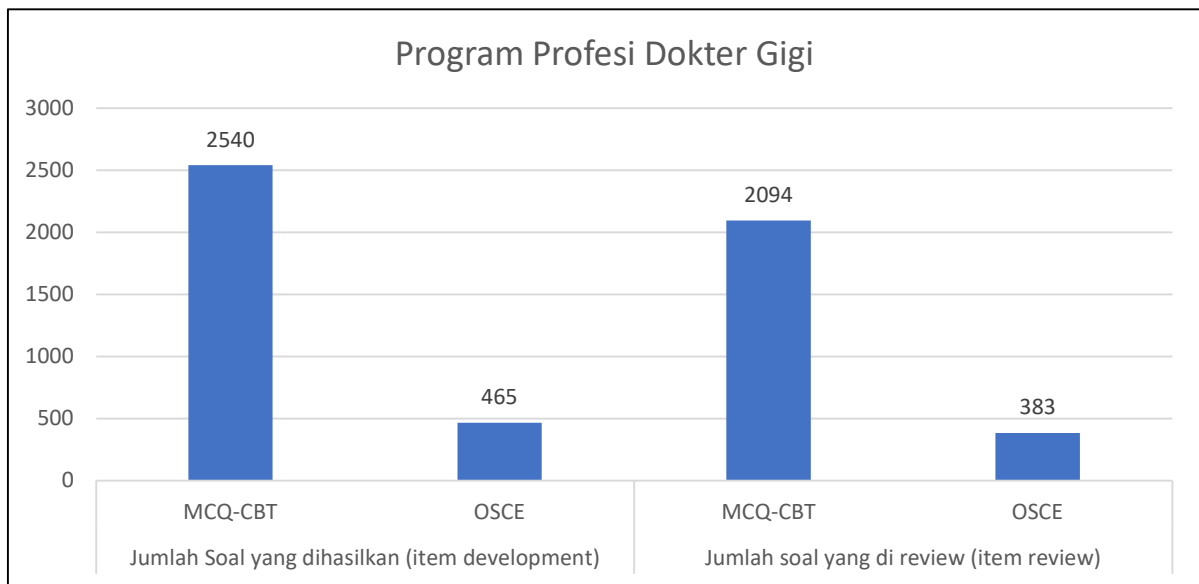
Bidang Ilmu	Jumlah Soal yang dihasilkan (<i>item development</i>)		Jumlah soal yang di review (<i>item review</i>)	
	MCQ-CBT	OSCE	MCQ-CBT	OSCE
Program Profesi Dokter Gigi	2540	465	2094	383

Tabel 3.27 Jumlah Soal yang dihasilkan (*item development*) dan Jumlah soal yang di review (*item review*) pada Bidang Kesehatan

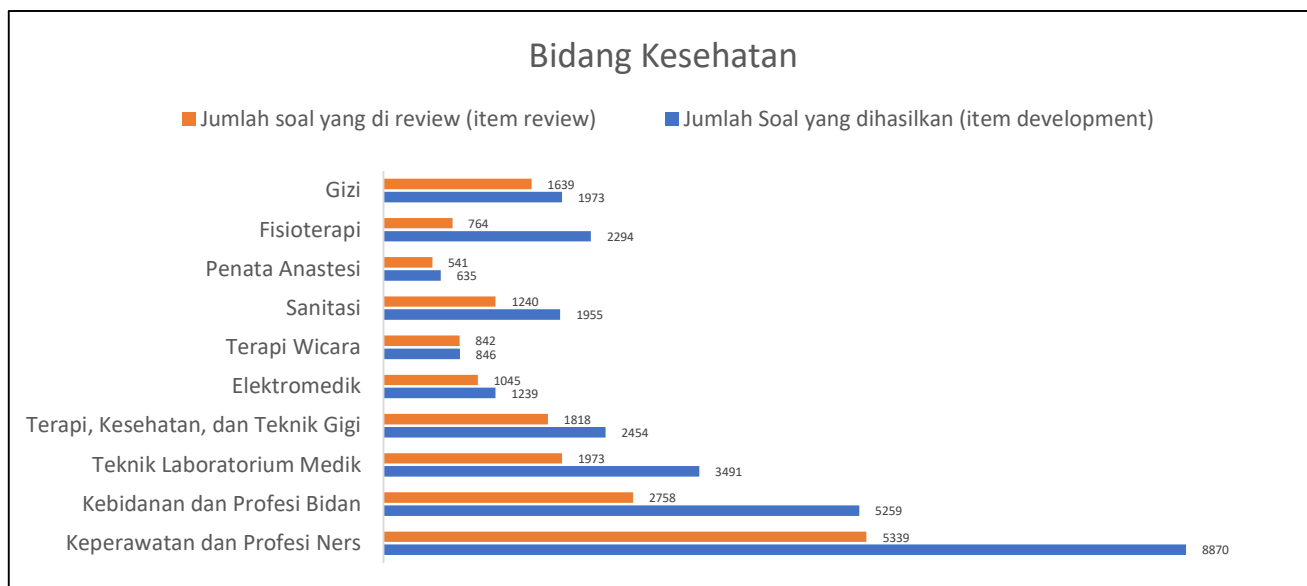
No	Bidang Ilmu	Jumlah Soal yang dihasilkan (<i>item development</i>)	Jumlah soal yang di review (<i>item review</i>)
1.	Keperawatan dan Profesi Ners	8870	5339
2.	Kebidanan dan Profesi Bidan	5259	2758
3.	Teknik Laboratorium Medik	3491	1973
4.	Terapi, Kesehatan, dan Teknik Gigi	2454	1818
5.	Elektromedik	1239	1045
6.	Terapi Wicara	846	842
7.	Sanitasi	1955	1240
8.	Penata Anastesi	635	541
9.	Fisioterapi	2294	764
10	Gizi	1973	1639



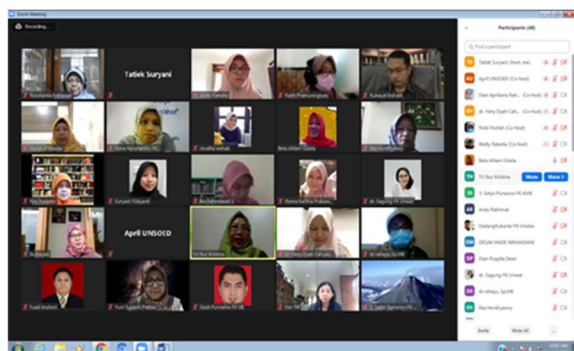
Gambar 33. Diagram Jumlah Jumlah Soal yang dihasilkan (*item development*) dan Jumlah soal yang di review(*item review*) pada Program Studi Program Profesi Dokter



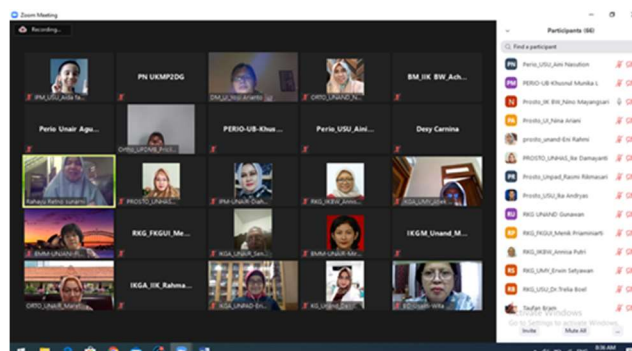
Gambar 34. Diagram Jumlah Jumlah Soal yang dihasilkan (*item development*) dan Jumlah soal yang di review (*item review*) pada Program Studi Program Profesi Dokter Gigi



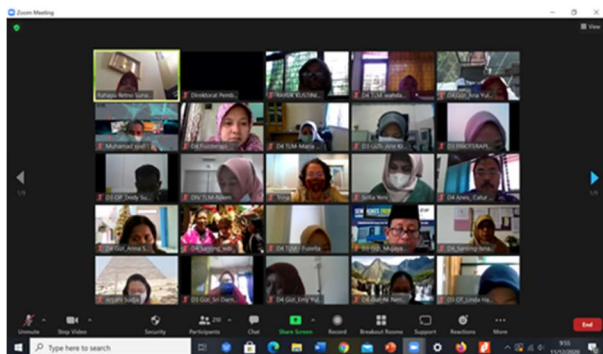
Gambar 35. Diagram Jumlah Jumlah Soal yang dihasilkan (*item development*) dan Jumlah soal yang di review (*item review*) pada Program Studi Bidang Kesehatan



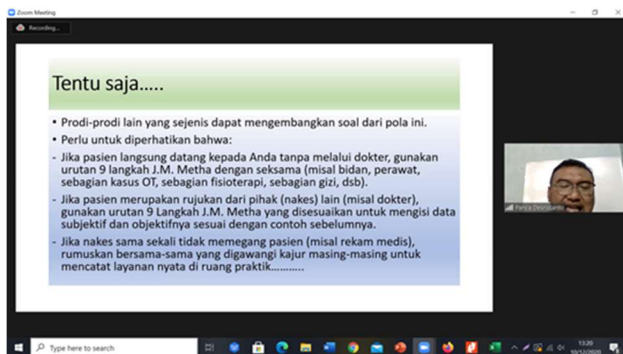
Gambar 36. Pelatihan Penulisan dan Review Soal MCQ, OSCE, Pelatihan Psikometrik soal MCQ dan OSCE Program Studi Profesi Dokter



Gambar 37. Pelatihan Penulisan dan Penelaahan Soal Uji Teori dan Praktik Program Studi Profesi Dokter Gigi



Gambar 38. Pengembangan Item Development dan Item Review Soal Program Studi Bidang Kesehatan



Gambar 39. Pengembangan Item Development dan Item Review Soal Program Studi Bidang Kesehatan

Kendala yang dihadapi:

- 1) Karena bentuk interaksi yang terbatas (pelatihan dilakukan secara daring), belum semua penulis soal yang hadir di pelatihan memahami cara penulisan soal yang baik.
- 2) Jumlah soal CBT dan OSCE yang terinput masih belum memenuhi target luaran yang diharapkan

Alternatif mengatasi kendala:

- 1) Adanya fasilitator dalam pelatihan yang membantu memahami cara penulisan soal dan memasukkan ke dalam aplikasi serta mengingatkan pengumpulan soal yang dilakukan secara mandiri.
- 2) Fasilitator membantu mengingatkan peserta pelatihan dan pakar nasional untuk menginput soal CBT dan OSCE sesuai dengan target luaran.
- 3) Penambahan waktu latihan mandiri ditambah pada masing-masing kelompok

Indikator Kinerja Kegiatan 9: Lulusan Terdata dalam Sistem Informasi Terintegrasi *Tracer Study*

Keberhasilan lulusan perguruan tinggi (PT) dalam memasuki dunia kerja merupakan salah satu indikator *outcome* pembelajaran dan relevansi PT bagi masyarakat. Dengan demikian, PT bertanggung jawab tidak hanya untuk melengkapi lulusan dengan kompetensi tertentu (*output* pembelajaran) tetapi juga wajib memfasilitasi dan menjembatani lulusan memasuki dunia kerja. Keberadaan Pusat Karir di PT mencerminkan tanggung jawab dan layanan PT bagi lulusan baru pada khususnya, dan mahasiswa pada umumnya sebagai calon lulusan.

Tracer study (TS) adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan 2 (dua) tahun setelah lulus dan bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia Pendidikan Tinggi (Dikti) ke dunia kerja, situasi kerja terakhir, keselarasan dan aplikasi kompetensi di dunia kerja. TS juga dapat memberikan informasi mengenai output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa

evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi Dikti terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

Tracer study dapat menyediakan informasi untuk kepentingan evaluasi hasil Dikti dan selanjutnya dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga Dikti bersangkutan. Di samping itu TS juga menyediakan informasi berharga mengenai hubungan antara Dikti dan dunia kerja profesional, menilai relevansi pendidikan tinggi, informasi bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan kelengkapan persyaratan bagi akreditasi Dikti.

Dalam rangka pengembangan PT, TS berperan penting misalnya sebagai tahap awal pengembangan kurikulum pendidikan tinggi yang baru. TS-pun menjadi salah satu syarat kelengkapan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan juga kelengkapan dokumen evaluasi diri yang diperlukan dalam pengajuan proposal melalui Kemendikbud. Meskipun demikian, dalam kenyataannya, TS yang dilakukan PT masih sangat bervariasi dari segi kualitas. Pemanfaatan informasi yang diperoleh pun belum optimal. Akreditasi di level fakultas dan program studi menyebabkan pelaksanaan TS di tingkat PT tidak dilaksanakan sehingga gambaran utuh di tingkat PT atau antar PT tidak tersedia.

Tracer study paling tepat dilaksanakan oleh Pusat Karir di tingkat PT karena, (1) memiliki populasi target yang sama, yaitu lulusan baru, (2) menghindari terjadinya ketimpangan pelayanan bagi mahasiswa dan lulusan akibat beragamnya kemampuan fakultas/program studi (3) pelaksanaan TS menjadi terinstitusionalisasi sehingga dapat lebih terjamin regularitasnya, (4) posisi Pusat Karir di struktur PT memungkinkan alokasi sumber daya bagi pelaksanaan TS, (5) efisiensi sumber daya dan (6) efektivitas pemanfaatan hasil karena terjaminnya komparabilitas data.

Dasar Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4) Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat, Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
- 5) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti.
- 6) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Prodi & PT.
- 7) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 8) Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang PD-Dikti.

Indikator Kinerja Kegiatan, target dan realisasinya pada tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Pogram *Tracer Study*

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan tinggi	1.5 Persentase lulusan perguruan tinggi yang bekerja dalam jangka waktu satu tahun setelah kelulusan	%	64,77	90.594 Mahasiswa	75,4
		1.6 Persentase lulusan perguruan tinggi dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	%	30	33.761 Mahasiswa	28,1

Pelaksanaan Pengembangan Instrumen *Tracer Study* untuk tahun 2020. Pengembangan instrument *Tracer Study* pada tahun 2020 dipergunakan untuk mengukur lulusan pada perguruan tinggi. Adapun hasil dari pengembangan instrumen tersebut sebanyak 29 butir.

Sistem pelaporan *tracer study*. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan memfasilitasi perguruan tinggi untuk melakukan pelaporan terkait dengan lulusannya pada sistem secara terpusat yaitu pada laman **pkts.Pembelajaran dan Kemahasiswaan.kemdikbud.go.id**. Hasil dari pelaporan tersebut digunakan kementerian serta perguruan tinggi untuk mengukur peningkatan kualitas pembelajaran dan relevansi perguruan tinggi.

Pengembangan Platform Inovatif ABGF (*Academic, Bussines, Government, Funding*). Platform ABGF merupakan sebuah platform yang didalamnya terdapat beberapa fungsi antara lain terdapat fungsi sindikker, *tracer study*, dan portofolio mahasiswa. Salah satu sistem berbasis ABGF yang sedang dikembangkan di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yaitu Portofolio Mahasiswa dan Alumni (PRIMA). PRIMA merupakan sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mencatat seluruh riwayat mahasiswa dan alumni yang terintegrasi dengan data pada PDDikti. *Output* dari PRIMA tersebut berupa CV Digital yang kedepannya dapat digunakan para mahasiswa dan alumni untuk menarik para pelaku industri. Selain itu, dalam sistem PRIMA juga terdapat beberapa instrumen *tracer study* yang dapat dilengkapi oleh mahasiswa dan alumni untuk kebutuhan data pada Kementerian. PRIMA dapat diakses pada website **prima.kemdikbud.go.id** setiap saat.

Pelaksanaan Sosialisasi serta pengisian data pada platform *Tracer Study* di beberapa Perguruan Tinggi dilakukan secara daring sehingga dapat memaksimalkan proses sosialisasi dimasa pandemi.

Terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaan *Tracer Study* yang diantaranya masih banyak perguruan tinggi yang belum mengirimkan/mengisikan data lulusannya kedalam sistem **pkts.Pembelajaran dan Kemahasiswaan.kemdikbud.go.id** sehingga data *tracer study* yang dihasilkan belum maksimal dan belum menunjukkan kondisi dari lulusan perguruan tinggi di

Indonesia. Terdapat beberapa kendala yang dialami saat dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan secara daring antara lain (a). Informasi Sosialisasi yang tidak merata dari Wilayah I s.d XIV, dan (b). beberapa Perguruan Tinggi di wilayah timur yang tidak bisa mengikuti karena terkendala jaringan sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan meminta peran dari masing-masing wilayah untuk mensosialisasikan Program *Tracer Study* melalui LLDikti, serta Untuk memfasilitasi peserta yang tidak tertampung di *Video Conference* aplikasi Zoom, hasil rekaman dari pelaksanaan sosialisasi kami upload melalui laman YouTube

<https://www.youtube.com/watch?v=xcMXOdPvMcA&t=9448s>.

Tabel 3.29 Kegiatan *Tracer Study* pada tahun 2020

Kegiatan		Tanggal
Pengembangan Instrument Tracer Study	:	23 Maret 2020
FGD Review Pengembangan Sistem Tracer Study	:	3 Agustus 2020
FGD Perbaikan Pengembangan Dashboard Sistem <i>Tracer Study</i> (Portofolio Mahasiswa)	:	11 Agustus 2020
Webinar Tracer Study dan Pendampingan Teknis Pemasukan Data <i>Tracer Study</i>	:	10 Juli 2020
FGD Pembahasan Privasi Data Tracer Study (Portofolio Mahasiswa)	:	9 September 2020
Workshop Pengisian Data Aplikasi PRIMA di LLDIKTI I – XIV dan beberapa perguruan tinggi	:	November s.d Desember

Tabel 3.30 Persentase Lulusan yang Bekerja dalam Jangka Satu Tahun Setelah Kelulusan

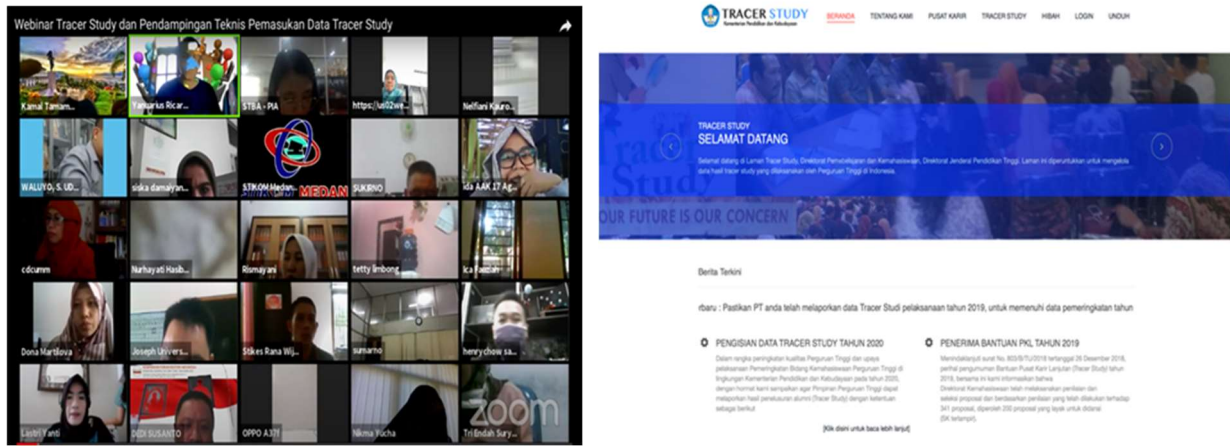
Tahun	2018	2019	Total	Presentase
Jumlah	63.995	26.599	90.594	75,4%
Total Pelaporan	84.184	35.969	120.153	

Tabel 3.31 Persentase Lulusan dengan Gaji 1,5x UMR

Tahun	2018	2019	Total	Presentase
Jumlah	29.564	4.197	33.761	28,1%
Total Pelaporan	84.184	35.969	120.153	

Keterangan:

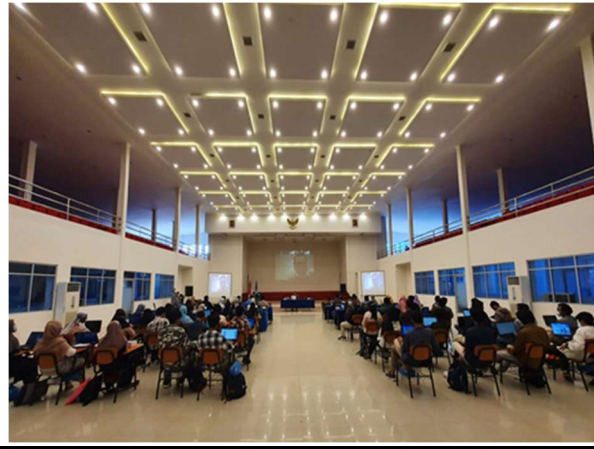
1. Sumber data diatas diambil dari jumlah seluruh mahasiswa yang terlapor pada system *tracer study* (pkts.Pembelajaran dan Kemahasiswaan.kemdikbud.go.id) mulai tahun 2018 – 2019 sebanyak **120.153** mahasiswa dari 545 PT di tahun 2018 dan 404 PT ditahun 2019 yang melaporkan.
2. UMR yang diambil dari penghasilan alumni sebesar >3 juta untuk tahun 2018 dan >5 juta untuk tahun 2019 dikarenakan perbedaan rata-rata kenaikan UMR ditiap tahunnya.



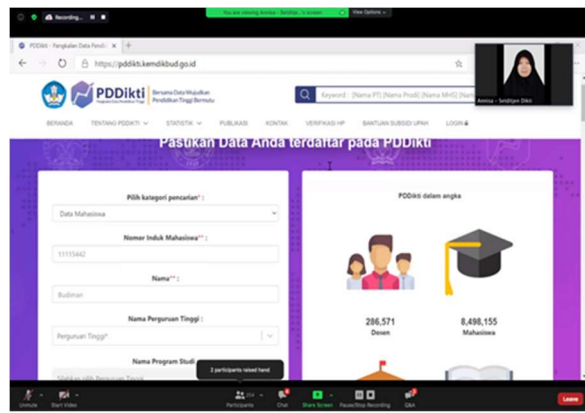
Gambar 40. Webinar Tracer Study dan Pendampingan Teknis Pemasukan Data *Tracer Study*

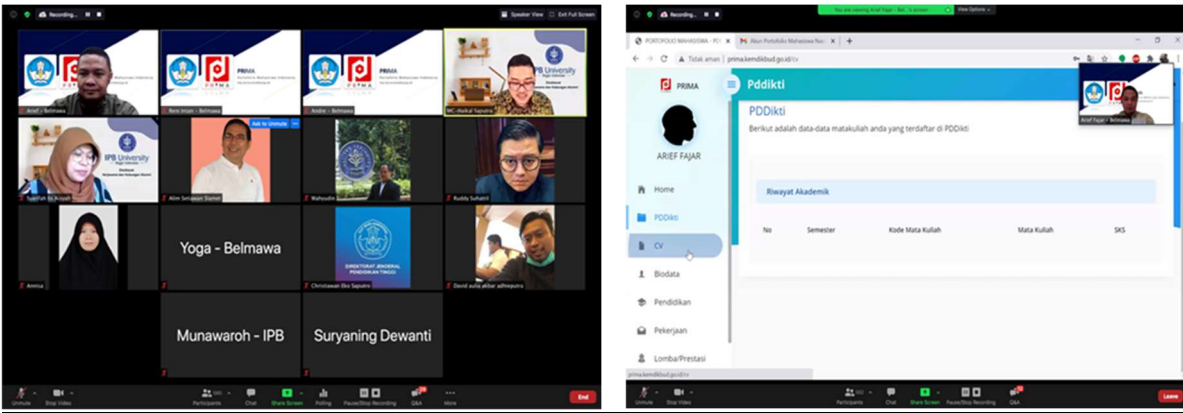


Gambar 41. Uji Publik Pengisian Data Aplikasi PRIMA di Universitas Pendidikan Indonesia



Gambar 42. Workshop Pengisian Data Aplikasi PRIMA yang dilakukan secara luring





Gambar 43. Workshop Pengisian Data Aplikasi PRIMA yang dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom

Kendala yang dihadapi:

- 1) Sosialisasi dilakukan secara daring, sehingga ada beberapa kendala yang dapat diuraikan:
 - a. Informasi Sosialisasi yang tidak merata dari Wilayah I s.d XIV;
 - b. Beberapa Perguruan Tinggi di wilayah timur yang tidak bisa mengikuti karena terkendala jaringan;
- 2) Beberapa anggaran tidak terserap karena kondisi Pandemi Covid-19;
- 3) Masih banyak perguruan tinggi yang belum melaporkan data hasil *tracer study* kedalam sistem pkts.Pembelajaran dan Kemahasiswaan.kemdikbud.go.id sehingga data yang dihasilkan belum maksimal dan belum menunjukkan kondisi dari lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

Alternatif mengatasi kendala:

- 1) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan meminta peran dari masing-masing wilayah untuk mensosialisasikan dan memberikan bimtek Program Tracer Studi melalui LLDikti;
- 2) Untuk memfasilitasi peserta yang tidak tertampung di Video Conference aplikasi Zoom, hasil rekaman dari pelaksanaan Sosialisasi kami upload melalui laman YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=xcMXOdPvMcA&t=9448s>;
- 3) Membuat surat edaran kembali untuk mengingatkan perguruan tinggi agar segera melaporkan data lulusannya kedalam sistem pkts.Pembelajaran dan Kemahasiswaan.kemdikbud.go.id serta melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada perguruan tinggi.

Indikator Kinerja Kegiatan 10: Layanan Sarana dan Prasarana

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan merupakan salah satu unit eselon II (dua) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebelumnya Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan merupakan eselon I (satu) atau Direktorat Jenderal pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang kemudian dilebur kembali ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu penunjang layanan

pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan adalah pelayanan Barang Milik Negara (BMN).

Dengan terlaksananya program layanan ini diharapkan seluruh kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang dilaksanakan di direktorat maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif, dan efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan pelayanan Barang Milik Negara, sehingga sasaran yang hendak dicapai akan tepat sasaran.

Maksud dan tujuan pengadaan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Paket pekerjaan yang dilaksanakan yaitu pengadaan peralatan IT perkantoran terdiri dari pengadaan tablet dan aksesoris pendukungnya.

Sasaran dari pengadaan ini adalah terlaksananya pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran pada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana menunjang tugas dan fungsi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peralatan dan fasilitas perkantoran, sehingga melaksanakan tugas dan fungsi menjadi lebih mudah dan optimal.

Tabel 3.32 Daftar Spesifikasi Teknis Pengadaan Peralatan IT Kantor

No.	Nama Barang	Spesifikasi	Kuantitas	Satuan
1	Tablet	IPAD Pro 11inch, Min. 128GB, wifi only	18	Unit
2	Microsoft Office	Microsoft Office Standar 2019 for mac	18	Unit
3	Keyboard	Magic Keyboard for iPad Pro 11-inch	18	Unit
4	Apple Pencil	Apple Pencil 2nd Generation	18	Unit

Indikator Kinerja Kegiatan 11: Layanan Dukungan Manajemen Satker

Pada tahun anggaran 2020 terjadi perubahan struktur organisasi di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi dari BA 042 (Kemenristekdikti) ke BA 023 (Kemendikbud) yang mengakibatkan blokir anggaran pada DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pembukaan blokir baru dapat terlaksana setelah keluarnya DIPA awal pada tanggal 16 April 2020 dengan anggaran awal satker sejumlah Rp409.187.426.000,- (empat ratus sembilan milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan mempercepat pencapaian kinerja satker sertaantisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, Direktorat Pembelajaran dan

Kemahasiswaan telah melakukan beberapa kali revisi anggaran. Adapun rincian Revisi DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan diuraikan pada tabel 3.33 berikut.

Tabel 3.33 Rincian Revisi DIPA Satker Direktorat Belmawa TA 2020

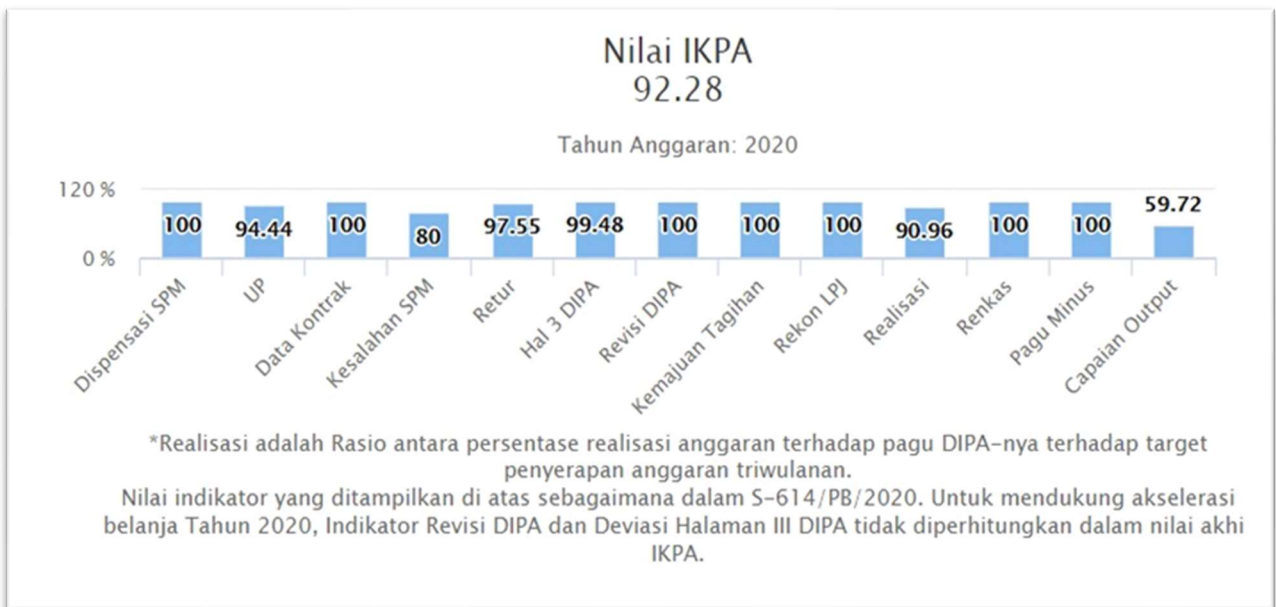
No	Revisi	Tanggal	Pagu	Kewenangan	Jenis Revisi
1.	Awal	16-04-2020	409.187.426.000	DJA	<i>Refocussing</i> penanganan covid-19 dan realokasi anggaran LTMPPT ke DIPA UNY
2.	01	29-04-2020	249.187.426.000	DJA	Pemutakhiran data akun covid-19
3.	02	16-07-2020	249.187.426.000	Kanwil DJPB	Luncuran PLN
4.	03	17-09-2020	252.318.398.000	DJA	Realokasi anggaran untuk pemenuhan kekurangan anggaran bidikmisi ongoing ke DIPA Direktorat dikti
5.	04	27-10-2020	241.318.398.000	DJA	<i>Refocussing</i> anggaran untuk gaji dosen honorer
6.	05	02-11-2020	201.318.398.000	Kanwil DJPB	Penyesuaian rencana penarikan Hal. III DIPA
7.	06	30-11-2020	201.318.398.000	Kanwil DJPB	Pemutakhiran data

Target untuk Indikator Kinerja Kegiatan ini dapat tercapai 100 %. Hal ini ditandai dengan tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja (Satker) Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun anggaran 2020. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran mengalami revisi sebanyak 7 kali. Revisi tersebut dilakukan dengan menyesuaikan peraturan dan ketentuan dari Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pada umumnya dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan evaluasi dan pemantauan melalui pengisian capaian output RKA-KL Bulanan (Januari s/d Desember) ke aplikasi SIMPROKA serta pengisian capaian kinerja berdasarkan Indikator Perjanjian Kinerja Eselon II dari Triwulan I hingga Triwulan IV. Seluruh penanggung jawab dan pelaksana program dan kegiatan harus melaporkan capaian kegiatannya baik capaian output maupun capaian Kinerja.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan membuat aplikasi Sistem Informasi Capaian Kinerja (SICAKEP) yang bertujuan untuk mendapatkan data capaian program lengkap, terpercaya, dan tersaji *real-time*. Aplikasi ini nantinya bisa diakses melalui mobile apps (android, ios, windows, dll).

Gambar 44. Tampilan Menu Login Aplikasi SiCakap



Gambar 45. Nilai IKPA Direktorat Belmawa Tahun 2020
(sumber :smart kemenkeu)

Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan pada umumnya dapat terlaksana dengan baik. Pembukaan blokir DIPA yang baru dapat terlaksana pada pertengahan bulan April 2020 dan munculnya pandemi covid-19 pada bulan Maret 2020 sampai sekarang menyebabkan perubahan pelaksanaan program di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga turut terkena dampak dan harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Kegiatan yang semula dilakukan luring, dengan adanya pandemi difokuskan untuk digelar secara daring demikian pula pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka maka berubah melalui email.

Program Pengelolaan Kepegawaian tahun 2020 meliputi berbagai kegiatan layanan ketatalaksanaan dan urusan manajemen Sumber Daya Manusia. Disamping administrasi persuratan, dilaksanakan juga kegiatan penyusunan analisis/ uraian jabatan dan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai.

Hal-hal yang berkaitan dengan urusan kepegawaian yang dilaksanakan tahun 2020, meliputi:

- a. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang pada gilirannya dilanjutkan dengan tahapan penilaian capaian kinerja setiap pegawai berdasarkan SKP yang telah disusun pada Semester I tahun 2020.
- b. Penyusunan Analisis Jabatan dan Standar Kompetensi Pegawai yang dimaksud untuk menetapkan syarat-syarat minimum yang diperlukan suatu jabatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c. Peningkatan kapasitas Pegawai melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang teknis serta kegiatan bagi seluruh pegawai Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan guna memperkuat motivasi dan koordinasi kerja.

Program kerja Sub Bagian Tata Usaha adalah menyiapkan segala kebutuhan kerumahaan di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Sepanjang tahun 2020 Subbag TU melanjutkan kegiatan penataan ruangan kerja para pegawai Dit. Pembelajaran dan Kemahasiswaan walaupun terkendala oleh ukuran ruangan yang sangat terbatas.

Keperluan rumah dinas Eselon II, perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan kerja, serta kebersihan dan keamanan merupakan tugas-tugas yang telah diselesaikan oleh Subbagian TU di tahun 2020. Target Indikator Kinerja Kegiatan terealisasi sepenuhnya dengan terselenggaranya Layanan Perkantoran selama 12 bulan.

Pelayanan Rumah Tangga juga melakukan pekerjaan tambahan berupa penataan dan relokasi gudang untuk keperluan Arsip Aktif. Relokasi gudang dilakukan dari gudang arsip di PUSPIPTEK Serpong ke Gudang Arsip Ciketing (Kemdikbud). Relokasi dan penataan arsip memberikan ruang gerak yang cukup luas dan ketersediaan ruangan untuk penataan arsip aktif tahun 2020.

Pelayanan Barang Milik Negara memprioritaskan penatausahaan BMN yang dilakukan pada tahun 2020, dan inventarisasi barang milik negara yang dilaksanakan sampai akhir tahun 2020. Pengelolaan dan penatausahaan BMN tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Laporan BMN Semester I, Semester II, dan Tahunan untuk tingkat Satuan Kerja (UAKB). Sampai dengan akhir tahun 2020, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan masih menunggu persetujuan izin proses hibah dari Kementerian Keuangan berupa hibah proyek PHLN yang meliputi gedung, peralatan dan mesin pembelajaran ke PTNBH.

Indikator Kinerja Kegiatan 12: Layanan Perkantoran

Tabel 3.34 Capaian Output Layanan Perkantoran

Sasaran Output	Output Kegiatan	Target	Realisasi	%
Layanan Perkantoran	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	100
	Jumlah operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	100

Pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar selama 12 bulan. Penetapan besaran gaji dan tunjangan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas, pembayaran gaji dan tunjangan terus diupayakan tepat waktu.

Untuk Program Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang di tinggal pada DIPA DITJEN DIKTI adalah diantaranya Mahasiswa Penerima Beasiswa yaitu :

Mahasiswa Penerima Beasiswa (Bidikmisi, ADiK dan Prestasi)

Bidikmisi

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2010. Bantuan biaya pendidikan diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 6 semester untuk program Diploma III. Beasiswa ini berupa pembebasan dari seluruh biaya pendidikan selama masa perkuliahan di perguruan tinggi, baik uang pangkal maupun SPP per bulan. Selain itu, mahasiswa penerima

beasiswa bidikmisi juga menerima uang saku untuk biaya kuliahnya yang akan diberikan setiap 6 bulan sekali.

Tujuan diselenggarakannya Beasiswa Bidikmisi adalah untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik, memberi bantuan biaya pendidikan kepada calon mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan program Diploma atau Sarjana sampai selesai dan tepat waktu, meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler, menimbulkan dampak positif bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetif, melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan sasaran program Bidikmisi adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi akademik yang baik.

Tabel 3.35 Capaian Bidikmisi 2020

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA	ANGGARAN
1	Bidikmisi On Going	373.296	6,600,000	2.463.753.600.000
		373.296		2.463.753.600.000

Tabel 3.36 Target dan Realisasi Penerima Bantuan Bidikmisi

URAIAN	VOLUME	SATUAN	REALISASI
Bidikmisi On Going	373.296	Mahasiswa	373.296
	373.296		373.296

Dampak dan Manfaat Kegiatan

Meningkatkan akses Pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki potensi baik secara akademik serta memenuhi kriteria untuk menempuh jenjang pendidikan tinggi.

Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan pencairan bidikmisi tahun 2020 mengalami permasalahan koordinasi antar bagian, karena di tahun 2020 Tupoksi penyaluran beasiswa ada di Pusat Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) sehingga data pencairan sempat terkendala koordinasi terutama pada masa pandemic covid-19.

Solusi

Mengadakan koordinasi baik daring maupun luring dengan berbagai pihak terkait pencairan yaitu Puslapdik, SesDirektorat Dikti dan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik)

Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) adalah program keberpihakan pemerintah kepada Putra-Putri asal daerah 3T dan orang asli Papua (OAP), untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTN, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada anak OAP lulusan SMA/MA/MAK sederajat yang berprestasi akademik baik, untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTN atau Politeknik diluar daerah Papua - Papua Barat dan Daerah 3 T dan menyiapkan sumber daya manusia anak Putra-Putri asal daerah 3T dan orang asli Papua (OAP), yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Untuk tahun 2020, ADik Angkatan 2020 yang berasal dari daerah 3T dan TKI pembiayaannya mengikuti Skema KIP-Kuliah.

Tabel 3.37 Capaian ADik 2020

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA	ANGGARAN
1	ADik Baru	800	8,400,000	6,720,000,000
2	ADik On Going	5,145	16,800,000	82,202,400,000
		5,945		88,922,400,000

Tabel 3.38 Populasi Mahasiswa ADik Tahun 2020

NO	ADIK	Ongoing	Baru
1	ADIK 3T	2022	-
2	ADIK PAPUA	1945	383
3	ADIK PAPUA BARAT	846	263
4	ADIK TKI	199	-

Dampak dan Manfaat Kegiatan

- 1) Meningkatnya kesempatan para siswa dari daerah Papua dan Papua Barat untuk studi di berbagai perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.
- 2) Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan khusus untuk para mahasiswa asal Papua dan Papua Barat.

Kendala yang dihadapi

- 1) Masih banyak mahasiswa yang tidak aktif kuliah dengan berbagai alasan
- 2) Pada tahun 2020 ada sekitar 154 calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus Progam ADik tapi tidak melakukan pendaftaran ulang, diduga yang menjadi penyebabnya adalah makin sulitnya akses dan informasi terkait perkuliahan untuk calon mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus ditengah kondisi pandemic covid-19.

Solusi

Untuk memastikan para calon mahasiswa bisa registrasi di perguruan tinggi tujuan maka mulai tahun 2021 jadwal perguruan tinggi yang berbeda akan diinformasikan ke calon mahasiswa dengan lebih awal dan lebih jelas.

Beasiswa Prestasi

Beasiswa Prestasi adalah beasiswa untuk para pemenang kompetisi/ lomba yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Dasar hukum pemberian beasiswa prestasi ekstrakurikuler adalah: (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (5) Undang-undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; dan (6) Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga.

Secara umum, Program ini bertujuan untuk mendorong terciptanya lulusan yang kompeten demi pencapaian sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif di masa depan. Secara khusus, program ini bertujuan untuk: (1) Menumbuhkan motivasi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademik yang sinergi dengan prestasi ekstrakurikuler; (2) Memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi di bidang ekstrakurikuler; (3) Membangun iklim kompetisi yang sehat antar mahasiswa bidang ekstrakurikuler; dan (4) Mendorong terbangunnya wadah kegiatan ekstrakurikuler bagi mahasiswa.

Tabel 3.39 Capaian Beasiswa Berprestasi 2020

URAIAN	VOL	SATUAN	ANGGARAN	REALISASI FISIK	REALISASI ANGGARAN
Beasiswa Prestasi	135	Mahasiswa	3.729.988.000	124	3.332.214.000

B. Realisasi Anggaran

Seluruh program di lingkungan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan mendapat dukungan dana untuk keperluan layanan perkantoran maupun substansi kegiatan. Dana layanan perkantoran dipergunakan untuk biaya operasional rutin dan pemeliharaan. Dana substansi dipergunakan untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran program dan kegiatan.

Tabel 3.40 Realisasi Per Jenis Belanja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Persentase
1	Pegawai	6.857.232.000	1.552.456.259	22,64%
2	Barang	183.841.166.000	172.172.576.587	93,65%
3	Modal	10.620.000.000	10.532.059.127	99,17%
Total		201.318.398.000	184.257.091.973	91,53%

Tabel 3.41 Rincian Realisasi Belanja Barang Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020

Uraian	Pagu	Realisasi
Belanja Bahan	762.126.000	526.748.604
Belanja Honor Output	9.890.850.000	8.465.783.000
Belanja Persediaan	252.972.000	242.415.348
Belanja operasional	5.588.867.000	2.836.174.722
Belanja Jasa Konsultan proyek PHLN	3.630.972.000	3.630.870.900
Belanja Jasa Konsultan	167.396.000	166.795.066
Jasa Profesi	18.120.300.000	17.980.309.895
Belanja Perjalanan Dinas	26.826.943.000	20.637.823.804
Belanja Bantuan Pemerintah	118.600.740.000	117.685.655.248
Total	183.841.166.000	172.172.576.587

Tabel 3.42 Realisasi Per Output Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Tahun 2020

No	Nama Kegiatan / Output	Volume Output				Anggaran		
		Target	Capaian	%	Satuan	Pagu	Realisasi SP2D (SPAN)	%
1	[4258] Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan			106,6		201.318.398.000	184.257.091.973	91,5
1.1	[4258.003] Layanan Pelaksanaan PHLN	1	1	100	Layanan	3.630.972.000	3.630.870.900	100
1.2	[4258.007] Program Studi Relevan KKNi / Industri 4.0 / Dunia Usaha (Kampus Merdeka)	765	949	124,1	Prodi	62.585.980.000	59.676.067.078	95,4
1.3	[4258.008] Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Adaptif Terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	42.520	48.455	113,9	Orang	66.634.500.000	63.680.938.988	95,6
1.4	[4258.009] Program Studi Melaksanakan Inovasi Pembelajaran Digital	600	600	100	Prodi	8.000.000.000	7.937.924.585	99,2
1.5	[4258.010] Program Studi Penyelenggara Uji Kompetensi	1.400	1.450	103,6	Prodi	5.500.000.000	4.394.771.704	79,9
1.6	[4258.011] Mahasiswa Mengikuti Transfer Kredit Internasional	125	187	149,6	Mahasiswa	5.000.000.000	4.003.809.050	80,1
1.7	[4258.012] Mahasiswa Menjalankan Wirausaha	1.000	1.038	103,8	Orang	8.500.000.000	7.911.992.340	93,1
1.8	[4258.013] Instrumen Kompetensi Lulusan	12	28	233,0	Bidang	7.000.000.000	5.987.314.845	85,5
1.9	[4258.014] Lulusan Terdata dalam Sistem Informasi Terintegrasi Tracer Study	200.000	120.153	60,1	Orang	11.000.000.000	10.571.239.538	96,1
1.10	[4258.951] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	1	100	Layanan	2.000.000.000	1.954.566.747	97,7
1.11	[4258.970] Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	1	100	Layanan	9.398.182.000	9.118.810.947	97
1.12	[4258.994] Layanan Perkantoran	1	1	100	Layanan	12.068.764.000	5.388.785.251	44,7
TOTAL				106,6		201.318.398.000	184.257.091.973	91,5

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Direktorat Belmawa) Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan Sasaran Kegiatan Tahun 2020. Lakin juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 2020 terinci dalam 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Pada tahun 2020, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Hal tersebut ditandai dengan persentase capaian dari 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan, seluruhnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Persentase capaian secara terperinci, yaitu (a) sejumlah 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan realisasi capaian 100% dan (b) sejumlah 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan realisasi capaian lebih dari 100%.

Keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2020 ini, merupakan dasar berpijak yang kuat bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk dapat melaksanakan program-program yang telah dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya. Di sisi lain, capaian juga dapat menjadi barometer bahwa program pada masa mendatang akan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan akan mengambil langkah strategis baik berupa perubahan, penyesuaian, dan pembaharuan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Renstra 2020-2024.

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. drh. Aris Junaidi, Ph.D.
Jabatan : Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, September 2020
Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,

NIZAM


ARIS JUNAIDI

TARGET KINERJA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Tersedianya program studi dan perguruan tinggi yang berkualitas	Jumlah program studi relevan KKNi/Industri 4.0/Dunia Usaha (Kampus Merdeka)	850
		Jumlah program studi yang difasilitasi akreditasi internasional	20
		Jumlah program studi yang melakukan kerjasama kurikulum dengan dunia industri/dunia usaha/PT QS Rank 100	600
2	Tersedianya pembelajaran yang relevan dan berkualitas	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun	200.000
		Jumlah lulusan perguruan tinggi (D4 dan S1) dengan pengalaman setidaknya 1 (satu) semester di luar kampus	625
		Jumlah mahasiswa yang menjalankan wirausaha	3.000
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan adaptif terhadap Industri 4.0 (Merdeka Belajar)	51.500
		Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	7.500

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	249.187.426.000



Jakarta, September 2020
Direktur Pembelajaran dan
Kemahasiswaan,

ARIS JUNAIDI

